

**Duski Samad**  
**Ahmad Kosasih**  
**Adi Bermasa**  
**Bachtiar**

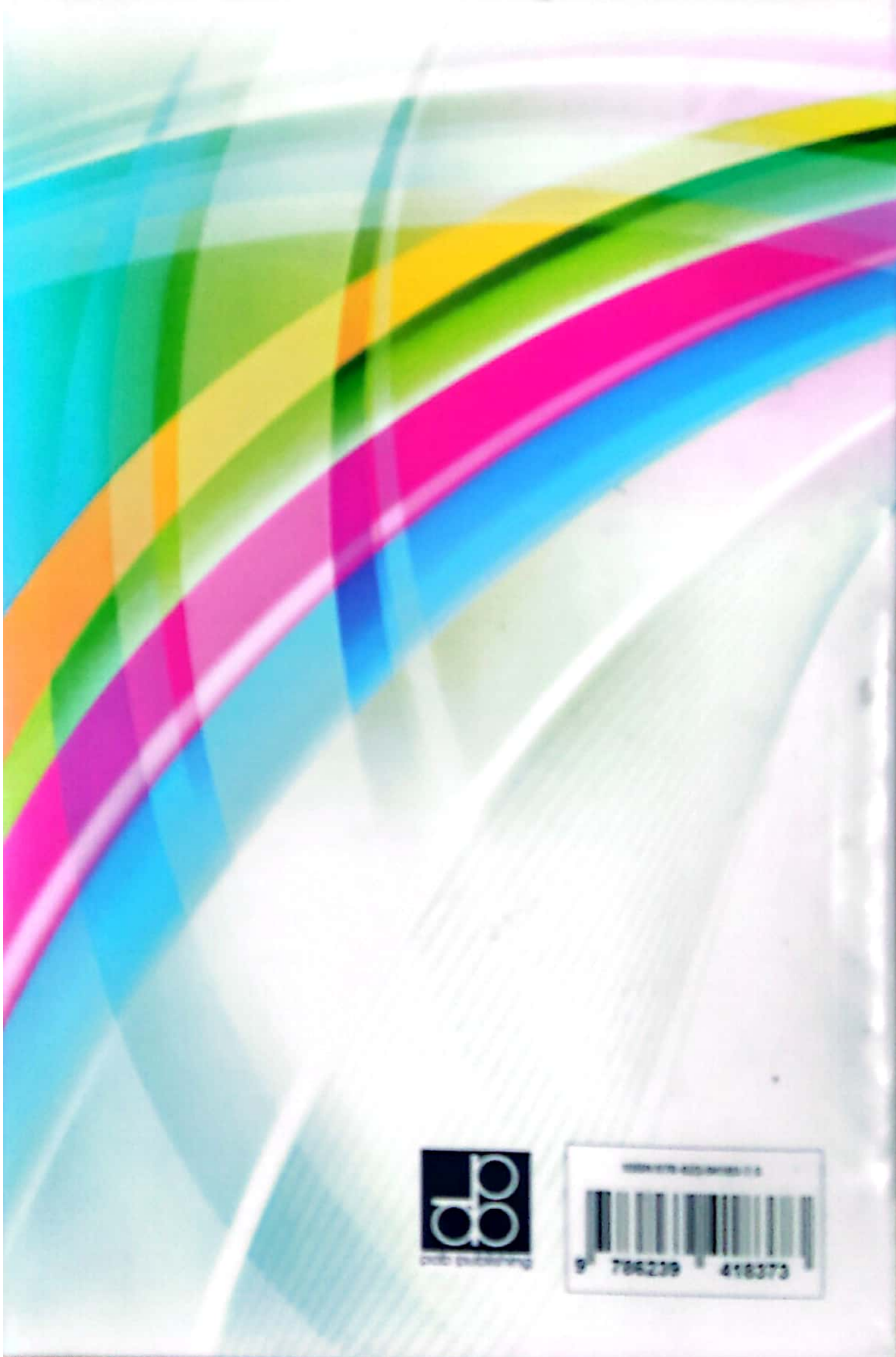
Editor  
Nurman Agus  
Muhammad Rifki

# MITIGASI INTOLERANSI

Kerukunan di Masa Pandemi



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020





*Mitigasi Intoleransi:  
Kerukunan di Masa Pandemi*

Duski Samad, Ahmad Kosasih, Adi Bermasa, Bachtiar  
Editor Nurman Agus, Muhammad Rifki

Hak Cipta 2020, Desember 2020,  
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Pustaka Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cet. I, Desember 2020.

vi+100 hal 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-94183-7-3



Penerbit PAB Publishing

copyrighEt@2020,  
by pabpublishing All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, menfotocopy atau  
memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit pab publishing  
Jl. Kuini No. 79 B Padang  
Website:  
[www.pabpublishing.co.id](http://www.pabpublishing.co.id) e-mail:  
[pab@kemenag.go.id](mailto:pab@kemenag.go.id)

ii | Mitigasi Intoleransi Kerukunan di Masa Pandemi

## PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*illahirabillahamin, segala puji, dan sanjungan kepada Allah *subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan karunia-Nya jagad semesta tetap memberikan kehidupan yang damai, aman dan saling menghargai, semoga ini tetap dirawat dan membawa kebaikan untuk semua, *amin*.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dasar pendiriannya SKB Nomor 9 dan 8 tahun 2006 adalah wadah dialog, penyalur dan penerima aspirasi serta sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang kerukunan umat beragama. Tahun 2020, masa Pandemi Covid 19, FKUB Provinsi Sumatera Barat telah melakukan 2 (dua) rapat kordinasi dengan FKUB se Sumatera Barat, dialog tokoh pada 8 (delapan) daerah potensi intoleransi, dan evaluasi dan monitoring kerukunan menyambut Natal dan tahun baru 2021.

Buku *Mitigasi Intoleransi* adalah catatan, dan pandangan dalam rapat kordinasi, dialog tokoh, dan monev. Judul *Mitigasi Intoleransi* menyatakan adanya bahaya dahsyat, konflik yang dapat saja muncul tiba-tiba, maka perlu kesiapan masyarakat, pemerintah, aparat keamanan untuk mencegah sebelum terjadi. *Manjawek sabalum jatuah, meminteh sabalum anyuik*, antisipasi, penegakan aturan dan kesolidan sosial, hendaknya dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.

Tulisan ini belum mewakili semua kenyataan lapangan, namun pemikiran tertulis ini adalah isyarat

yang harus dibaca jernih. Kesalahan, dan kekurangan  
sempurnaan karya ini mohon dikoreksi dan semoga  
bermanfaat untuk semua. *amin*

Padang, 30 Desember 2020

Tim Penulis dan Editor



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
MITIGASI INTOLERANSI.....	1
A. Mengapa Mitigasi Intoleransi? .....	3
B. Aman, Damai dan Toleran.....	6
C. Tidak Ada Hambatan Beribadah .....	7
D. Faktor Kuliner dan Prilaku .....	9
E. Dialog berbasis kultur .....	11
F. Resistensi pendekatan keamanan .....	12
G. Masyarakat Bisa Marah! .....	13
H. Rukun di Titik Nadir .....	17
I. Dialog Memelihara Rukun.....	19
J. Kerukunan dan Kebhinikaan .....	20
K. "Imam" Pancasila .....	25
DINAMIKA KERUKUNAN .....	31
A. Kondusif dan Dinamis.....	33
B. Mencermati Aliran Sempalan.....	36
C. FKUB di Pesisir Selatan Belum Waktunya .....	37
D. Kebutuhan FKUB di Solok Selatan .....	42
E. Merajut Dan Memelihara Ukhuwah.....	48
F. Kerukunan Dalam Bingkai NKRI .....	53
OPTIMISME KERUKUNAN.....	65
A. Kerukunan Itu Mensejahterakan.....	67
B. Pasaman Aman.....	69
C. Solok Selatan Kawasan Membanggakan .....	71
D. Peran Penting FKUB .....	74
MEMAHAMI KEARIFAN LOKAL .....	77
REKOMENDASI RAPAT KORDINASI.....	92
SK FKUB PROVINSI SUMATERA BARAT .....	96
PERNYATAAN MASYARAKAT .....	98
PHOTO KEGIATAN FKUB 2020 .....	100

## **MITIGASI INTOLERANSI**



**DUSKI SAMAD**

## A. MENGAPA MITIGASI INTOLERANSI?

Kata mitigasi lazim dikenal berhubungan dengan gempa dan bencana alam secara umum. Mitigasi gempa adalah mempersiapkan diri menghadapi bencana gempa, tsunami, banjir dan bahaya yang akan terjadi saat bencana alam. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

Intoleransi dalam sebutan mudah dikatakan intoleran. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah intoleran /*in-to-le-ran*/ a tidak tenggang rasa; tidak toleran. Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda.

Dalam memahami Toleransi dan Intoleransi, *Pertama* yang harus dimengerti dari defenisi toleran-intoleran adalah merupakan sebuah "tindakan", bukan pikiran, apalagi sebuah aturan. Disebut toleran, menurut Cohen (2004) adalah tindakan yang disengaja oleh actor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun actor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu (Cohen 2004, hal. 69). Artinya, didalam toleransi terkandung dua kata kunci, yang sekaligus berperan sebagai prinsip, yaitu (1) "kesengajaan" (*intent*),



dan (2) “tidak-mengganggu” (*Non-interference*). Keduanya adalah element yang sama penting.

Russell Powell dan Steve Clarke dalam *Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines*, bahkan memposisikan elemen “tidak-mengganggu” sebagai inti dari toleransi. Dan sikap tidak-mengganggu ini harus bersifat direct, atau “tidak-mengganggu-secara langsung”. Powel memberi contoh: Seorang Katolik disebut toleran adalah dia yang membolehkan praktik keagamaan Protestan di masyarakat, sekalipun dia tidak setuju dan punya kemampuan melarang tapi justru memilih tidak mengganggunya (Powell & Clarke, Oxford Univ, p.4-5).

Contoh lain mungkin kita temukan; Seorang Muslim (M) yang membolehkan perayaan natal sahabatnya yang Nasrani (N), sekalipun M memilih tidak mengucapkan “Selamat Natal” kepada sahabatnya itu karena dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Maka dalam perspektif Powell dan Clark, M adalah seorang yang toleran karena sengaja menahan dirinya dari tindakan tidak setuju, seraya membolehkan ibadah ritual Natal berjalan tanpa gangguannya. Artinya, hanya dengan “sengaja-tidak-mengganggu” (*intent to non-interfere*) terhadap orang lain maka seorang disebut toleran. Sengaja menjadi sangat penting, sebab jika seorang tidak-mengganggu hanya karena acuh dan abai maka dia belum dapat disebut toleran.

Sementara arti “intoleransi” adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi; (1) ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, (2) sikap mencampuri

dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan (3) sengaja-mengganggu orang lain.<sup>1</sup>

Menyandingkan kata mitigasi dengan intoleransi pada judul di atas adalah bahagian dari diskusi dalam memahami sikap, tindakan dan kemungkinan akibat lanjutan dari relasi sosial antara komunitas sosial masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, khususnya mereka yang budaya, gaya hidup dan kuliner yang tidak sama, bahkan bertentangan sama sekali. Sebagai contoh yang memerlukan mitigasi intoleransi tentang kuliner dan budaya sosial. Komunitas muslim yang haramnya baginya makan Babi, sementara masyarakat Batak dan non muslim lain, Babi adalah makanan enak dan lezat bagi mereka.

Mitigasi intoleransi makna sederhananya adalah mencegah, menanggulangi dan mendorong tidak saling mengganggu antara komunitas yang berbeda iman, makanan dan budaya hidup. Memang problema mengukur toleransi dan intoleransi itu tidak mudah dan sangat sulit bila diukur dengan statistik, walau bisa, tapi banyak kemungkinan penyimpangan dan tidak akurat. Dalam hal ini, variable "tindakan social" adalah yang paling relevan untuk mengukur toleran-intoleran. Selain itu, variable seperti; regulasi dan aturan, demografi tentu sukar, alih-alih kontraproduktif jika dipaksakan untuk mengukur toleran-intoleran.

Dapat diasumsikan bahwa gempa kerukunan dapat saja terjadi, seperti gesekan sosial, perkelahian antar etnis dan agama, kegaduhan masyarakat bahkan eskalasinya bisa sampai pada konflik berdarah, bila mitigasi intoleransi lemah dilakukan oleh pihak yang berhubungan kait

---

1 Muhammad Farid, *Memahami Intoleransi dalam Ruang Publik*, Geotimes, Kamis, 27 Desember 2018.

dengan pemeliharaan kerukunan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berisikan tokoh-tokoh lintas agama merasakan betul pentingnya mitigasi intoleransi digerakkan melalui dialog dan komunikasi terbuka.

Pemahaman lapangan yang dilakukan di beberapa daerah di Sumatera Barat yang dalam tahun belakangan ada kasus intoleransi, khususnya saat Natal dan Tahun Baru menampakkan arah bahwa potensi intoleransi akan tetap saja ada. Faktor relasi sosial yang timpang secara ekonomi, sulitnya mengedalikan arus media sosial sebagai sumber provokasi, berbedanya budaya hidup dan kuliner masyarakat beda iman dan etnis adalah titik api (*hot spot*) yang dapat membakar lahan toleransi dan kebersamaan dalam masyarakat majemuk.

## **B. AMAN, DAMAI DAN TOLERAN**

Toleran, damai, dan kehidupan yang aman adalah harapan dan keniscayaan (*taken for granted*) setiap orang, tak terkecuali masyarakat yang hidup berdampingan beda iman, namun sudah disatukan sejarah sosial yang panjang<sup>2</sup>. Trauma intoleransi yang dituduhkan oleh media sosial dan adanya LSM Setara pada masyarakat Nagari Kamang Baru, lalu dipublikasi luas saat Natal tahun 2019 lalu, benar-benar menimbulkan suasana tidak nyaman bagi hubungan sosial antar individu setahun terakhir ini.

Realitasnya masyarakat tidak pernah seperti yang dimuat di media. Masyarakat beda keyakinan, beda suku dan beda kultur sudah hadir dan terbentuk aman, toleran dan damai sejak awal tahun 1970 lalu, ketika Pemerintah

---

<sup>2</sup>Pernyataan Datuk Abu Sinaro, Pemilik Resort Talabang Sakti, Nagari Kamang Baru di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, saat kunjungan Tim FKUB Sumatera Barat dalam Monev Kerukunan di saat Natal dan Tahun Baru, Kamis, 24 Desember 2020 dengan didampingi aparat Kecamatan.



menetapkan daerah ini sebagai lokasi penempatan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terdiri suku Sunda dan Jawa. Setelah setengah abad dalam multikultur, dan multi agama perkembangan dan kemajuan masyarakat menunjukkan arah yang baik, begitu juga ekonomi tumbuh membaik dan menjadikan masyarakat lokal dan pendatang lebih sejahtera.

Fakta di masyarakat aslinya, tidak pernah ada konflik komunitas, gesekan sosial yang menimbulkan sikap intoleransi dan kecemburuan sosial yang melebihi batas individu yang memang itu wajar dalam masyarakat majemuk. Komitmen dan perjanjian antar tokoh adat lokal dengan transmigrasi bahwa kedua pihak akan saling menghargai, hidup berdampingan secara baik, tidak akan mengusik tatanan sosial, keagamaan dan budaya Minangkabau sudah menjadi riil dan kenyataan hidup. Image yang dibuat media sosial bahwa daerah ini terjadi sikap intoleransi adalah berlebihan dan diyakini ada motif tidak baik bagi yang mempublikasinya.

### **C. TIDAK ADA HAMBATAN BERIBADAH**

Tidak ada hambatan, larangan dan kecurigaan dari umat Islam Kamang Baru bagi saudaranya non muslim melakukan ibadah, baik perorangan maupun dalam bentuk perayaan Natal setiap tahunnya. Kondisi sosial yang aman, damai dan tidak ada hambatan beribadah bagi non muslim itu sudah berlangsung sejak terjadi pembauran sosial tahun 1970 lalu, kejadian yang dipublikasi media itu adalah tidak sepenuhnya dan lebih banyak bumbu politiknya.<sup>3</sup>

Mengapa ada krisis kepercayaan dari umat Islam terhadap saudara se bangsannya, non muslim pada Natal

---

<sup>3</sup> Wawancara, Datuk Abu dan Hamid Tokoh Masyarakat Jawa di Kamang Baru, 24 Desember 2020.

2019 lalu, itu disebabkan sikap tidak menghargai perjanjian antar tokoh masyarakat bahwa setiap kegiatan sosial yang mengumpulkan orang banyak akan diberitahukan lebih dahulu kepada tokoh masyarakat dan Pemerintah Nagari. Suasana menjadi panas, saat Non Muslim menebar di media sosial tempat ibadah mereka di beberapa titik di rumah penduduk, bahkan pada satu rumah Nagari Parik Rintang mereka mendirikan tenda besar untuk perayaan Natal tanpa ada pemberitahuan pada tokoh masyarakat dan aparat nagari.<sup>4</sup>

Kegaduhan sosial dan timbulnya sikap saling percaya pada saat Natal 2019 lalu itu, yang akhirnya memunculkan sikap intoleransi sama sekali tidaklah dipicu beda iman, tidak pula karena faktor mereka beribadah misa, merayakan Natal dan jauh dari sikap intoleransi umat Islam di daerah ini. Masyarakat sudah paham betul bahwa Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama selain Islam sudah diterima. Namun berkenaan dengan pendirian Gereja dan tempat ibadah tentu diminta mempedomani peraturan dan komitmen moral pendahulu.

Nagari Kamang Baru, Sungai Tambang, Parik Rintang dan daerah lainnya dalam lingkup adat Minangkabau yang berfilosofikan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basand Kitabullah* (ABSSBK) adalah ulayat adat Minangkabau, di mana tokoh adat pemilik kewenangan sosial terhadap apa penggunaan tanah tersebut, maka untuk adanya pendirian Gereja dan rumah ibadah apapun tidak cukup memenuhi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 saja. Tidak ada maksud pemuka adat menghalangi umat Kristiani mendirikan Gereja sebagai rumah Ibadah di ulayat

---

<sup>4</sup> Ibid.

mereka, kecuali menghormati kearifan lokal dan perjanjian tokoh adat di tahun 1970 dengan pemuka adat warga Transmigrasi dulu.

#### **D. FAKTOR KULINER DAN PRILAKU**

Mitigasi intoleransi yang dimaksudkan dalam tema tulisan ini adalah menyiapkan kondisi yang memungkinkan tidak terjadi krisis kepercayaan, sikap tidak menghargai antar etnis dan beda keyakinan. Mitigasi adalah mendorong munculnya ikhtiar kolektif dari setiap individu yang berbeda kultur, agama, ras dan gaya hidup untuk saling menjaga diri, keluarga kelompok dan jamaahnya dari provokasi pihak mana saja. Mitigasi intoleransi di tengah arus informasi bebas dan massif ini memerlukan ketahanan sosial yang tangguh dengan memaksimalkan peran informal leader.

Fakta lapangan memastikan mitigasi intoleransi harus terus menerus dilakukan, karena “gempa” toleransi mudah sekali terjadinya, bukan karena faktor agama saja, akan tetapi justru yang paling memancing itu adalah faktor di luar agama. Faktor kuliner, karakter, sikap sosial dan gaya hidup suku tertentu, non muslim, yang secara demonstratif, terbuka, bahkan dengan membonceng di jalan raya makanan mereka yang tidak nyaman umat Islam yang sudah lama bertapak di tempat itu. Pesta minuman keras, bakar Babi, dan kuliner Anjing adalah paling tidak disukai oleh penduduk lokal, oleh mereka yang suka itu, beda iman, menunjukkan secara terbuka. Faktor kuliner Babi dan Anjing, perdagangan terbuka, dan pestanya yang dulu dilakukan tidak terbuka, adalah akan terus menjadi pemicu kegaduhan terselubung yang mesti dicegah, dimitigasi semua pihak.

Faktor karakter, perilaku dan sosial yang tidak mengindahkan kearifan lokal, adat istiadat dari pendatang baru, mayoritasnya suku Batak, jarang sekali



dari Suku Jawa yang datang melalui Trasmigrasi, adalah faktor sosial yang mesti diantisipasi oleh tokoh adat, dan aparat di tingkat Nagari. Edukasi penghargaan pada kearifan lokal, sikap hidup membaur, tidak eksklusif dan tetap menjaga keserasian sosial adalah bentuk mitigasi intoleransi yang sangat boleh jadi dapat menguat. Penegakkan hukum sosial, bahwa penduduk lokal, adalah pihak yang sering tersinggung dan dirugikan oleh pendatang dengan sikap acuh pada sistem sosial, harus dicegah guna mewujudkan toleransi.

Adanya transaksi ekonomi, berupa jual beli daging bagi, pasar penampungan penjual Babi yang didapatkan oleh suku anak dalam (Kubu), di beberapa titik lokasi di Kabupaten Sijunjung dan Darmasraya, misalnya di Nagari Sialang, di kedai tertutup terpal di pinggiran jalan lintas Sumatera, begitu juga ada di Koto Salak Darmasraya, bahkan di tahun 2018 lalu pernah ada pembuangan daging Babi di Nagari Tanah Badatuang Kabupaten Sijunjung adalah potensi tersembunyi (*laten*) yang akan memicu intoleransi, ini harus mendapat perhatian dari aparat yang terkait dengan kesehatan makanan masyarakat dan dinas Peternakan.

#### **E. DIALOG BERBASIS KULTUR**

Mitigasi intoleransi sebagai ikhtiar dan kerja memastikan tegaknya toleransi, kedamaian dan kenyamanan sulit dapat dicapai bila Pemerintah Daerah sebatas pendekatan hukum dan pemerintahan belaka. Dialog berbasis kultur, pertemuan antar tokoh, meneguhkan relasi sosial antar penduduk yang beda iman dan budaya melalui ieven sosial, melakukan edukasi kewargaan (*civic education*) adalah gerakan yang mesti mendapat perhatian untuk dilakukan berkelanjutan pada daerah yang multi agama, ras dan budaya, seperti Kamang Baru di Sijunjung dan Darmasraya.

Natal dan Tahun Baru 2021 mendatang FKUB Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Darmasraya sudah melakukan dialog menyambut Natal dan mengajak tokoh agama non Muslim untuk kembali pada kesepakatan awal, melakukan ibadah Natal di rumah yang sudah ditunjuk dan tidak perlu mempublikasinya di media, lebih berbahaya lagi *share* di medsos, karena itu dapat ditafsirkan lain oleh mereka yang punya tujuan merusak kerukunan dan toleransi di daerah ini. Umat Islam juga sudah memahami bahwa beda iman, perayaan Natal itu adalah wajar dan dapat dilakukan umat Kristian di rumah yang sudah mereka sepakati, namun tidaklah baik menyebutnya sebagai Gereja, karena izin dan eksistensinya belum ada.

#### **F. RESISTENSI PENDEKATAN KEAMANAN**

Trauma kasus 2019 yang panjang dan melelahkan tokoh masyarakat menghadiri pertemuan dengan berbagai dinas, instansi, Badan dan aparat keamanan Kabupaten, Provinsi dan Nasional juga menimbulkan efek ikutan berupa resistensi pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan sosial, lebih lagi konflik yang bermotif agama.

Jelang Natal dan tahun baru 2021 ada informasi intelejen yang memerlukan antipasi dari aparat keamanan. Perantau anak nagari Kamang Baru menyampaikan melalui media sosial pada pemuda di kampungnya, bahwa kami tidak senang nagari kami jika Natal masih ada umat yang melakukan gangguan apapun bentuk kegiatannya. Jika itu terjadi, para pemuda kampung harus mengambil sikap dan tindakan tegas. Ada pula informasi media sosial yang tidak jelas sumbernya bahwa ada pihak luar yang akan mengacak-acak masjid di Parik Rantang Sungai Tambang, seperti kejadian di Kabupaten Padang Pariaman beberapa waktu sebelumnya. Informasi dari mulut ke mulut dan medsos yang tidak jelas

sumbernya, ditambah lagi pengalaman Natal 2019 lalu, maka aparat keamanan tidak mau mengambil resiko, untuk itu Polres Sijunjung menempatkan 1 SSK, berjumlah 200 orang personil Brimob di Nagari Parik Rantang Sungai Tambang<sup>5</sup>

Pemuka masyarakat di Kamang Baru Sijunjung begitu juga pemuka masyarakat di Sikabau Darmasraya dalam diskusi menyatakan sebenarnya kami merasa tidak nyaman dengan menampakan secara terbuka pendekatan keamanan dengan menempatkan Brimob bersenjata, karena ada kesan mencemaskan dan sepertinya masalah Perayaan Natal mendapat resistensi dari masyarakat kami. Sebaiknya ke depan aparat keamanan cukup melakukan pendekatan keamanan tertutup, dan melakukan dialog dan pemantauan seperti yang dilakukan FKUB, Kesbang berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan tokoh masyarakat lokal. (Catatan Monev FKUB, 24 Desember 2020).

#### **G. MASYARAKAT BISA MARAH!<sup>6</sup>**

Tahun 2020 ada tiga kondisi yang memerlukan kondusifnya kerukunan di Sumatera Barat. Suasana Pandemi Covid 19, MTQ Nasional, dan Pilkada 2019 perlu suasana rukun dan damai. FKUB sebagai institusi yang pendiriannya difasilitasi negara, bertujuan sebagai lembaga menjaga kerukunan. Kerukunan yang hendak dikembangkan prinsip pokoknya adalah pemeliharaan kerukunan yang bersumber dari inisiatif, dan usaha masyarakat bukan pembinaan yang bersifat perintah atau intruksional dari negara. Kordinasi FKUB Sunbar ke

---

<sup>5</sup> Diskusi Monev FKUB bersama Pemuka Masyarakat, Kesbang, Camat dan Kapolsek, di Resort Talabang Sakti, Kamang Baru, Kamis, 24 Desember 2020.

<sup>6</sup> Judul tulisan di atas muncul saat mencermati pernyataan tokoh masyarakat pada kegiatan kordinasi dan monitoring pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Sijunjung, Selasa, 01 September 2020 di Kantor Kemenag Kab. Sijunjung



Kabupaten Sijunjung adalah bahagian untuk mencermati realitas potensi konflik yang sejak 2015 sampai sekarang masih perlu dikoordinasikan . Konflik akhir tahun 2019 di Sijunjung, khusus Kamang Baru, realitas dilapangan lebih dominan faktor budaya dan dilanggarnya perjanjian antara komunitas lokal dengan penduduk pendatang yang beda iman.

Dalam sambutan Kepala Kantor Kementrian mengemuka nyata sekali bahwa kerukunan di Sinjunjung pada dasarnya kondusif. Adanya kasus di Kamang Baru 2019, saat itu karena ada pihak yang menjadi biang perusak.

Perusakan kerukunan di Sijunjung 2019 itu disebabkan oleh dua hal. (1). Provokasi dari Gereja Paroki Sawahlunto sebelum natal mengeluarkan 5 (lima) jadwal Natal pada 5 (lima) rumah penduduk. (2). Pidato Sudarto, tokoh LSM yang memprovokasi umat Islam yang menyebut atas nama HAM dan minta pendirian gereja di Kamang Baru.

Kemudian masyarakat tidak nyaman prilaku LSM Setara dan Gereja Paroki tersebut, dampaknya dibongkar perjanjian 2005 antara ninik mamak dengan pihak transmigrasi yang tidak membolehkan adanya pendirian gereja. Konflik 2019 pihak Pemkab Kabupaten Sijunjung saat itu sudah memfasilitasi ibadah di rumah penduduk Sawahlunto dan menyediakan mobil untuk ibadah ke Sawahlunto. Sayangnya tidak dipakai mereka, dan tidak pula ada informasi apa maunya mereka.

Dalam menyikapi kordinasi, aparat kepolisian menyampai kan sebaiknya tokoh non muslim diundang dalam pertemuan FKUB ini, untuk menjadi kurir agar informasi ini sampai kepadanya. Potensi konflik di Kamang Baru, fakta lapangan sampai saat ini gesekkan yang bersumber dari masyarakat lokal tidak ada. Medsos,

adanya provokasi LSM Setara dan Gereja Paroki yang menjadi pemicu konflik di lapis masyarakat. Agar semua pihak hati-hati bahwa setiap event politik akan menjadi entri point dengan satu tujuan mereka mendirikan gereja. Aparat mencium mereka akan terus menggoreng lagi kasus ini untuk mencapai tujuan pendirian gereja di Kamang Baru itu.

Kesbangpol dalam sambutan menyampaikan bahwa Katolik ortodoks di Kamang Baru begitu kuat komandonya. Ini dapat dibuktikan apapun surat dari pemerintah yang akan mereka tangapi selalu atas izin Paroki di Sawahlunto dan Keuskupan Padang. Kini bangunan di Kamang Baru dalam bentuk fisiknya sudah gereja, walau belum peresmian dan belum adanya surat Keputusan yang mengizinkan nya. Bangunan luasnya sekitar 15 meter x 10 meter memuat sekitar 300 orang. Gesekan antara Katolik dan Kristen Tahun 2017 dapat diselesaikan. Tahun 2018 konflik disebabkan adanya postingan jemaat Kristen bahwa ada Gereja Santo Paulus di Sungai Tambang, ini menimbulkan gejolak masyarakat. Akhir Tahun 2019 kembali yang dipicu oleh Katolik menjadi viral di nasional dan internasional.

Patut dimengerti realitasnya di Kamang Baru, tidak bisa diperlakukan sama antara Kristen dengan Katolik. Protestan bisa bergaul, membaur, mudah berdampingan dan penganut Katolik ortodoks tertutup. Masuknya Non muslim ke daerah ini dari transmigrasi di Padang Tarok itu aman. Kini, walaupun Pemda sudah mensyaratkan transmigrasi muslim, namun konflik mudah terjadi dan menjadi meluas lagi saat Perusahaan Tambang Carmindo memasukkan tenaga kerja asing non muslim.

Tokoh Masyarakat, Bapak Mulyanto menyampaikan bahwa konflik 2019 Kamang Baru di picu Gereja Paroki Sawahlunto yang menjadwalkan 5 rumah penduduk.

Saat itu sudah ada kesepakatan difasilitasi ke Sawahlunto. Perayaan Natal di rumah Adiyat, meninggalkan konflik karena itu mengingkari perjanjian dengan masyarakat. Tahun 2019 itu lebih 300 orang beribadah di rumah Adiyat. Patut diketahui Wali Nagari Kamang Baru mengeluarkan pengurusan izin pendirian rumah ibadah oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) bukan memberi izin gereja.

Tokoh Masyarakat, Kades Iskandar menyatakan sejak tahun 1969 transmigrasi itu tidak ada masalah. Tahun 1990 masuk Pertambangan Carbindo mulai timbul gesekan sosial dan dapat diselesaikan Wali Nagari diikuti dengan kesepakatan bersama ninik mamak. Kejadian itu setelah adanya Tabligh akbar dan tahun 2005 disepakati perjanjian ninik mamak dengan tokoh Protestan Angiat.

Tokoh Masyarakat, penyuluh agama menyatakan bahwa keberadaan FKUB untuk menjaga kerukunan itu harga mati. Sudah beberapa kali kesepakatan dan aturan dilanggar. Seharusnya untuk kasus Kamang Baru adalah penegakkan hukum, perlu ada eksekusi yang tegas dan tidak pandang bulu. Aparat pemerintah vertikal, lebih lagi aparat hukum tidak boleh bermain api, seolah melindungi pelanggar hukum. Berbagai pandangan yang mengemuka patut dipertimbangkan cara dan pendekatan yang solutif.

**Pertama** : perlu dilakukan claster antara Kristen dengan Katolik. Perlu ada tim komunikasi silent, untuk mengetahui akar masalah. Perlu informal aproach, jangan masuk melalui jalur formal, justru akan dijadikannya senjata untuk menyudutkan.

**Kedua; Cultural** aproach. Tugas FKUB memelihara kerukunan maksudnya adalah memantapkan kearifan lokal dan kesepakatan sosial. Semangat untuk

menghargai kesepakatan 2005 dan sudah disempurnakan dengan lebih tolerans kesepakatan 2017, pointnya diizinkan beribadah dirumah pribadi, tidak di rumah ibadah.

**Ketiga**, Pendampingan oleh FKUB Kabupaten Sijunjung dan soliditas dan kesatuan sikap Pemerintah adalah penting untuk mencegah konflik dan meredam kemarahan rakyat. Keempat, mediasi FKUB dengan semua tokoh agama di Sijunjung perlu dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan dialog mendalam antar tokoh agama dan pimpinan gereja yang difasilitasi Pemda dan Kemenag.

#### H. RUKUN DI TITIK NADIR<sup>7</sup>

Wali Nagari Abdur Razak menyatakan bahwa sejak tahun 1999 ada gesekan saat Hutama Karya mengizinkan camp nya tempat ibadah, surat perjanjian sudah ada. Pada tahun 2018 mereka non muslim memberitahu akan ada peringatan natal, dilarang oleh Wali Nagari, lalu mereka protes dengan memakai surat resmi, ini yang dijadikan dasar oleh mereka. Kami tahu mereka masuk tanpa diketahui oleh Kepala jorong. Tahun 2019 justru kami di Nagari yang seperti tertuduh, pasukan berkuda. Tahun 2020 ini kami di dikunjungi HAM, mengiringi.

Datuk Sati tokoh masyarakat menegaskan bahwa kesabaran masyarakat sudah baik dan cenderung statis. Sebenarnya adanya stempel gereja itu sudah fakta bahwa non muslim melanggar hukum. Kami yakin bahwa masalah ini adalah pasti ada susupan pihak lain. Patut diketahui bahwa jika ninik mamak tidak ada berperan maka mereka non muslim itu sudah hancur. Ada

---

<sup>7</sup> Judul di atas hadir saat mendengar dengan cermat pernyataan tokoh masyarakat Darmasraya dalam rapat koordinasi FKUB Provinsi Sumatera Barat dengan FKUB Kabupaten Darmasraya, Rabu, 02 September 2020.

pendapat bahwa paling lama 3 bulan hanya kacau, setelah itu aman. Di Kampung Baru itu Katolik hanya 6 kk dan di Sikabau 10 kk. Kami bisa beli lahan akan beli, jika ada tokoh masyarakat ditahan, masyarakat sudah sepakat untuk membiayainya.

Tokoh adat yang lain dengan tegas menyatakan bahwa Katolik dan Kristen, non muslim lokal yang berdomisili di Darmasraya ini pada dasarnya melakukan pemaksaan kehendak. Kami merasa benar-benar tidak nyaman pasca krisis Desember 2019. Kami didatangi pejabat pusat, Komnas HAM, ombudsman dan aparat yang mengiring agar tokoh masyarakat mencabut pengaduan terhadap Sudarto.

Dinamika kerukunan di daerah ini awalnya aman, nyaman dan damai. Kami menyerahkan tanah dan kini jumlah mereka juga tidak berapa pertambahannya, namun kini mereka berani dan seringkali menimbulkan keributan dengan lingkungan. Ada suasana yang tidak nyaman dan berpotensi konflik jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.

Konklusi dari dialog antara lain:

1. Iklim kerukunan di Darmasraya kini sudah dititik nadir dan tahun 2020 ini rawan konflik. Faktornya dipicu oleh miskin komunikasi jujur aparat dengan ninik mamak, seperti yang kami rasakan cara yang dilakukan komisi HAM dan ombudsman mengiring dan menekan ninik mamak.
2. Dialog selalu ditolak mereka, buktinya mengapa komisi HAM yang meminta kami mencabut pengaduan, bukan mereka.
3. Prilaku, tindakan perorangan yang abaikan kearifan lokal. Kursus di rumah ibuk Trisila merusak anak-anak kami adalah pemicu konflik di masa datang.

resume kordinasi fkub sumbar dan fkub darmasraya.  
Padang 2 September 2020.

#### **I. DIALOG, MEMELIHARA RUKUN<sup>8</sup>**

Kabupaten Pasaman Barat diakui seringkali ada gesekan dan kegaduhan yang oleh pihak tertentu, khususnya media sosial, dikatakan pemicunya adalah faktor iman atau beda keyakinan. Multietnis, agama dan suku adalah rahmat dan tentu juga bisa berubah menjadi musibah bila tidak dikelola dengan baik, benar dan bijaksana, dengan mempedomani regulasi dan kearifan lokal.

Kehadiran FKUB adalah media konsultasi, kordinasi, mediasi dan advokasi bertanggung jawab menjaga dan memelihara kerukunan. Dalam buku tanya jawab FKUB yang dikeluarkan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI di jelaskan bahwa keberadaan FKUB adalah partisipasi masyarakat untuk memelihara kerukunan dari, oleh dan untuk masyarakat umat beragama itu sendiri. Pemeliharaan kerukunan dimaksudkan pada insiatif umat beragama untuk hidup damai, toleran dan rukun.

Pemeliharaan berbeda dengan pembinaan. Pembinaan mengandung ada arahan, tekanan dan bentuk yang diinginkan oleh pembina. Ide dasar kerukunan itu berasal dari umat beragama, bukan setting an, arahan dan atau tekanan dari pemerintah atau pihak mana saja. Pemeliharaan kerukunan adalah kebutuhan pokok semua umat beragama, oleh karenanya mereka secara kolektif, kolegal menjaga kerukunan dengan mengedepankan dialog dan kearifan lokal.

---

<sup>8</sup> Judul di atas kesimpulan dari kordinasi FKUB Sumbar ke FKUB Kabupaten Pasaman Barat dan stakeholder hari Rabu, 2 September 2020 bertempat di Kantor Kemenag Pasaman Barat.



Keragaman umat beragama di Pasaman Barat, baik oleh karena faktor historis, sosiologis dan maupun disebabkan adanya kebijakan nasional transmigrasi adalah keniscayaan yang tentu disikapi dengan bijak dan realistis. Keragaman sebagai realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu tidak mesti mengeser, meniadakan ciri khas daerah, identitas, kultur, budaya dan kearifan lokal satu daerah. Maka dalam kerangka itu adalah satu keniscayaan dalam memelihara kerukunan perlu mengarusutamakan kearifan lokal dengan tetap mengacu pada regulasi.

Menjaga keseimbangan dan keserasian regulasi dan kearifan lokal diperlukan dialog sehat antar komunitas umat beragama. Dialog sehat adalah kejujuran, keikhlasan dan kesiapan menerima keragaman dan sekaligus menghargai local genius. Dialog akan mudah terlaksana bila kehidupan sosial keagamaan dapat berjalan alamiah, natural dan tidak ada settingan, rekayasa, ataupun bentuk lain yang menciderai kerukunan dan kearifan lokal.DS.

## **J. KERUKUNAN, KEBHINIKAAAN DI TENGAH COVID 19 DAN PILKADA SERENTAK<sup>9</sup>**

Kerukunan asalnya katanya rukun. Rukun dalam konteks kehidupan sosial keagamaan artinya (1) baik dan damai; tidak bertengkar (tentang pertalian persahabatan dan sebagainya) contoh: "Ibu berharap kamu berdua dapat hidup rukun" 2) bersatu hati; bersepakat contoh: 'penduduk kampung ini rukun sekali' Pemerintah memberikan pengertian kerukunan dalam

---

<sup>9</sup> Duski Samad, Selasa, 13 Oktober 2020 di Gedung Aziz Chan Balaikota Padang.

kehidupan beragama dan berbangsa dalam satu line. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, memuat pengertian kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama. Bersamaan itu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

#### **ESENSI KERUKUNAN.**

Kerukunan yang dimaksud oleh PBM Nomor 8 dan 9 itu dijelaskan buku tanya jawab yang dikeluarkan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI. Materi pokoknya;

Tanya : Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama?

Jawab : Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanya : Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama?

Jawab : Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Tanya : Mengapa digunakan istilah pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan pembinaan kerukunan umat beragama?

Jawab : Kata pemeliharaan menunjukkan keaktifan masyarakat (umat beragama) untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada yaitu kondisi kerukunan. Sedangkan kata pembinaan menunjukkan keaktifan dari atas (Pemerintah dan pemerintah daerah) untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Tanya : Apa yang dimaksud dengan Forum Kerukunan Umat Beragama?

Jawab : Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Tanya : Untuk apa Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk?

Jawab: Pembentukan FKUB bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tanya : Dimana kedudukan FKUB dalam tata pemerintahan kita?

Jawab : FKUB ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

#### **KEBHINKAAN: TOLERANSI DAN PERSATUAN**

Kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka berarti "macam". Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Sehingga Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno atau dengan kata lain "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Jadi pada intinya Indonesia itu Kepulauan yang beraneka ragam dan unik dengan sendirinya tetapi tetap jadi satu Kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bhineka Tunggal Ika bukanlah hanya sekedar semboyan, melainkan tersimpan makna yang tersirat didalamnya yang harus kita ketahui dan pahami. Pada prinsipnya semboyan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting yaitu toleransi dan kesatuan. Pertama, Toleransi inilah yang dapat mencairkan perbedaan menjadi persatuan sehingga tidak ada perpecahan atau konflik. Kedua, Kesatuan merupakan hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dari berbagai macam ras, suku, dan agama.

#### **COVID 19 DAN PILKADA**

Kecemasan terhadap terjangkit covid 19 belum dapat dikatakan habis. Berita, fakta dan realita terus menimbulkan was-was, disiplin protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) belum maksimal, oleh karenanya semua pihak tetap peduli, bersatu dan

kompak menjaga diri dan menegakan Perda AKB dan membatasi diri untuk keluar rumah dan berkerumun.

Saat yang sama Pilkada serentak harus tetap di jalankan dengan ketentuan di masa pandemi. Dua realitas yang tidak mudah menyatukan, dilarang berkumpul untuk cegah penularan corona, di saat sama kampanye memerlukan orang berkumpul untuk mendengar program calon kepala daerah. Ta'arud (pertentangan) yang harus di damaikan, mana yang paling sedikit mudaratnya? Kaidah fiqhiyah mengarahkan; menolak kebudayaan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan (درء المفساد مقدم على جلب المصالح) Contoh, Berkumur dan menghisap air kedalam hidung ketika berwudhu' merupakan sesuatu yang disunnahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasa.

#### **KONKOLUSI**

Kerukunan itu keniscayaan yang wajib di pelihara bersama. Kebhinkaan adalah sunatullah, liatarafu, dan wajib di syukuri. Pilkada adalah jalan melahirkan pemimpin tentu wajib disukseskan. Covid 19 adalah ancaman komunitas yang wajib di cegah melalui peneran protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mandi untuk bersih diri. Semoga semua agenda dapat berjalan baik dan terhindar terjakiti virus corona. amin. 10102020.

#### **K. "IMAM" PANCASILAIS**

Kata "imam" dalam tanda petik pada judul tulisan di atas maksudnya adalah untuk menyatakan orang terdepan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, berbangsa dan sosial kemasyarakatan, itulah dianya etnis atau suku Minangkabau baik secara normatif maupun sosiologis

empiris.

Konklusi penulis bahwa orang Minang adalah imam Pancasila, di dasarkan pada pandangan luas dari berbagai tokoh yang pro dan kontra saat berlangsungnya ILC di TV ONE, Selasa, 8 September 2020 dalam topik SUMBAR BELUM PANCASILAIS? Debat terbuka sesi malam itu begitu menarik, karena di pantik pernyataan Ketua DPP PDI P Puan Maharani saat menyerahkan dukungan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Ir. Mulyadi dan Drs. Ali Mukhni, 3 September 2020 di Jakarta dengan SEMOGA SUMBAR MEMANG MENJADI PANCASILAIS.

Apa pun motif Puan Maharani, kelompok mana saja yang menshare ucapan itu, berikut motifnya, kenyataannya dunia maya (media sosial) dan dunia palanta menjadi hiruk pikuk, baik di Sumatera Barat, begitu juga di perantauan orang Minang. Makna tersirat dari pernyataan itu, oleh anak Nagari Minang yang sudah mendarah daging baginya kata kiasan, kata bersayap, natijah kata yang menempatkan Sumbar masyarakat belum utuh Pancasila-nya adalah masqul dan sulit diterima nalar sejarah Indonesia.

#### MENGUAK TABIR SEJARAH

Hikmah dan bahan ajar paling nyata dari diskusi ILC Sumbar belum Pancasila? adalah terkuaknya sejarah yang selama ini ditutupi oleh rejim untuk kepentingan kekuasaan. Anhar Gonggong Pakar sejarah dengan jelas mengungkap peran luar biasa besarnya pahlawan pergerakan nasional yang berasal dari Minang. Anhar menyatakan bahwa Nurcholis Madjid pernah menghitung bahwa pergerakan nasional sejak perintis kemerdekaan, perjuangan dan pengisian kemerdekaan awal berdirinya Republik Indonesia ada 60 % (enam puluh persen) adalah etnis Minangkabau. Ditegaskan



pula bahwa mereka para pemimpin yang tidak paham sejarah adalah berbahaya bagi masa depan Negara dan bangsa.

Anhar juga menyoroti pernyataan Puan Maharani, dengan menjelaskan dua konsep kunci semoga dan memang, maknanya adalah harapan yang di negasikan. Sulit menyatakan pada kata tersebut bahwa ada sesuatu yang diselubungi, bahwa Sumbar diragukan Pancasila-nya. Harusnya pemimpin dapat membedakan antara masalah politik praktis, terbatasnya dukungan Sumbar terhadap PDI P, dengan sejarah pendirian bangsa, dimana Sumatera Barat memiliki andil besar.

Hasril Chaniago mengungkap data sejarah yang selama ini tertutup awan kekuasaan. Mulai dari menyebut dari 9 panitia perumus Pancasila, 3 orang etnis Minang, Hatta, M.Yamin dan Agussalim, terus ditegaskan pula bahwa PRRI bukan pemberontakan, tetapi meluruskan penyimpangan Pancasila oleh Soekarno, ia juga menyatakan orang Minang sangat sayang pada Soekarno. Orang Minang menyelamatkan Soekarno ditinggalkan Belanda di Bengkulu, di bawa orang Minang ke Padang, sampai Soekarno bertemu dengan Syekh Abbas, ibu-ibu Minang menyumbangkan gelang emas untuk beli pesawat dan pernak pernik lainnya.

Kuat, beragam dan argumentatifnya tokoh dan cendikiawan Minang jauh sebelum kemerdekaan dikemukakan narasumber, Partai Komunis Indonesia (PKI) pun ada tokohnya di Minangkabau. Basilang kayu dalam tungku, disinan api mangko hiduik, makna perbedaan adalah sumber kemajuan etnis Minang. Rumah Makan minang di nusantara dan mancanegara menjadi bukti orang Minang diterima semua komunitas. Putra terbaik Minang yang hebat dalam berdiplomasi dan berbahasa menjadikan mereka tokoh ternama dan

pengerak di Semanjung Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan sampai ke mancanegara.

Ustad Abdul Somad ( UAS) menegaskan bahwa orang Minang adalah etnis yang sangat Pancasilais dengan dasar Islam dan adat yang sudah menyatu dalam kehidupan sosial orang Minang. Satu persatu kelima sila dalam Pancasila itu sudah diterapkan orang Minang dalam kesehariannya. Orang Minang semua Islam, berketuhanan yang Maha Esa. Kemaanusiaan adil dan beradab, orang Minang menyebut rajo adil rajo di sambah, rajo zalim, rajo di sanggah. Persatuan bagi etnis Minang, disebutkan sasakik, sa hino sa mulia, musyawarah, bulek air ke pembuluh, bulek kato jo mufakat. Keadialan sosial, hati tungau samo dicacah, hati gajah samo di lapah. Pancasilaisnya orang Minang adalah prototipe yang tepat.

Penyeimbang diskusi dari PDIP Basarah, Arteria dan Irma Suryani Chaniago tidak kalah hebatnya menjelaskan siapa Puan Maharani, sosok perempuan berdarah Minang yang sudah sampai pada taraf luar biasa yang harusnya dihargai oleh orang Minang. Mereka meyakinkan audience bahwa tidak ada motif, niat, dan tujuan tidak baik dari Puan untuk merendahkan martabat dan harga diri orang Minang. Irma Suryani menyebut pernyataan itu adalah doa Puan untuk orang Sumbar. Arteria dengan lugas menyatakan PDI P dan Pemerintah tetap memberi kan perhatian lebih bagi Sumbar dan generasi Sumbar yang ikut bersamanya.

Dialektika berfikir yang dikemukakan gerbongnya Puan Maharani jelas untuk meyakinkan pemirsa TV One bahwa patronasenya adalah benar, bermaksud baik, tidak ada unsur merendahkan orang Minang, mengiring masalahnya pada soal Pilkada. Apapun cara pandang mereka, realitas nya PDIP tidak punya akar dukungan

yang memadai dengan alasan yang sulit dijelaskan. Dugaan atau persepsi yang terbangun atau mungkin dibangun oleh pihak tertentu sedikit sekali dukungan itu dapat dijadikan indikator Sumbar belum Pancasila. Walau sulit dibuktikan, tetapi persepsi seperti boleh jadi pemicu muncul statemen multi tafsir Mbak Puan Maharani.

Pernyataan pakar komunikasi politik Sihombing sepertinya membenarkan bahwa Sumbar mayoritas muslim itu belum Pancasila dengan mengaitkan sulitnya pendirian rumah ibadah yang harus meminta izin lingkungan. Logika sesatnya nyata sekali saat menyatakan mendirikan pabrik yang limbahnya dapat merusak lingkungan, dibiarkan. Rumah ibadah untuk hubungan vertikal dipersulit, silogisme simplikasi itu indikasi mereka sepertinya membenarkan Sumbar belum Pancasila. Pernyataan Sihombing ini diluruskan Fadli Zon tidak ada hubungan dengan tema dan cenderung tidak paham substansi masalah.

Gubernur Irwan Prayitno dengan data dan nalar lurus menyampaikan kami tetap berpikiran positif ucapan Mbak Puan Maharani. Tapi perlu dinyatakan Sumbar dari segi pemerintah sepenuhnya mengikuti aturan pusat dan mengamalkan Pancasila. Pemda Sumbar bersama Kab.Kota konsisten pada aturan dan regulasi sesuai Pancasila. Begitu juga halnya dengan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki adat istiadat, ABSSBK, yang intinya kompatibel dengan Pancasila.

#### **MINTA MAAF, MEMAAFKAN**

Ending ILC pada dorongan narasumber agar Puan meminta maaf dan Anhar Gonggong menyebut memaafkan jauh lebih mulia. Karni Ilyas sang moderator menyambutnya siapa yang harus memaafkan karena yang tersinggung adalah komunitas yang banyak sekali.

Disambung Anhar ayo selesaikan masalah ini dengan memaafkan, saya yakin ini karena Pilkada serentak saja. Politik praktis mestinya ditempat secara proporsional, sejarah dan hubungan antar suku dan anak bangsa harus lebih diutamakan. Saya orang Indonesia.

Pihak yang mendesakkan Puan minta maaf menyambut pula betapa dewasanya pemimpin bila sadar dan mau berandah hati. Di jawab pula, jika Puan minta maaf, justru itu memperpanjang masalah seolahnya ia salah dan akan tidak baik untuk semua. Karni Ilyas mengajak semua orang Sumatera Barat memaafkan Uni Puan dan kembali menempatkan masalah secara arif bijaksana.

#### PENUTUP

Konklusi dan penisbahan bahwa orang Minang sejatinya adalah Imam Pancasila dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penerapan yang terpadu antara agama dan budaya, adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) menjadi modal sosial yang harus tetap dirawat dan disesuaikan kemajuan zaman. Narasi Sumatera Barat belum Pancasila lahir bisa disebabkan a historis, sejarah dilupakan, atau kecewa politis, bisa juga "gorengan politik pilkada".

Apapun motif, siapapun yang bermain atau memainkan, ILC dengan topik SUMBAR BELUM PANCASILAIS? telah menjadi Sekolah Publik yang menguak tabir sejarah Minangkabau dan kontribusi anak nagari bagi NKRI yang ditutupi rezim berkuasa. Semoga anak Nagari Minang di ranah dan rantau sadar dan bergerak maju menjadi penyelamat warisan pendahulu yang bisa saja diselewengkan oleh pengkhianat bangsa. Duski ambon1/4wismanindahsiteba09092020.

## **DINAMIKA KERUKUNAN**



AHMAD KOSASIH

## A. KONDUSIF DAN DINAMIS <sup>10</sup>

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh FKUB Sumatera Barat di maksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh terutama dalam suasana umat Kristiani melaksanakan ibadah natalan dan peringatan tahun baru 2021 M dan sekaligus untuk memonitor dan mengevaluasi kondisi organisasi dan

---

<sup>10</sup> Tim II FKUB provinsi Sumatera Barat ke kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh tanggal 24 s.d. 25 desember 2020



kegiatan FKUB kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh satu tahun terakhir.

Dalam pertemuan dengan Kemenag dan FKUB yang bertempat di kantor kementerian Agama kota Bukittinggi, diperoleh keterangan dari Kakan kemenag yang diwakili oleh Kasubag TU, H. Zulfikar, S. Ag., S.Th bahwa pihak kementerian agama bersama FKUB sudah mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh berbagai agama di kota Bukittinggi.

Di kota Bukittinggi terdapat empat macam agama yaitu: (1) Islam (2) Kristen (3) Katolik (4) Budha. Bahwa kerukunan di kota Bukittinggi kondusif dan dalam keadaan aman. Tapi ada saja laporan dari pihak luar yang menyatakan bahwa Bukittinggi tidak aman. Adapun jumlah gereja di kota Bukittinggi secara resmi ada dua tapi dalam kenyataannya ada 6, sedangkan yang empat lagi hanyalah tempat ibadah yang tidak resmi.

Ada seorang bernama Sudarto yang datang dari luar Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan umatnya. Mereka kadang-kadang memaksakan kehendak untuk mengadakan upacara natalan di tempat-tempat yang tidak resmi sebagai rumah ibadah. Hal itu, menurut Antonius dari Wakil Katolik, disebabkan dalam Kristen banyak sekte-sekte dan masing-masing sekte ingin mendirikan rumah ibadah namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat gereja yang tidak resmi itu adalah BNKP (Banua Nias Kristen Protestan), GPDI, Adven dan Betani (Betel). Selain itu juga ada Bihara tidak resmi di kawasan Kampung Cina. Karena itu, Suhefri dari FKUB Provinsi meminta agar dilakukan klarifikasi tentang jumlah gereja yang ada dalam kota Bukittinggi. Buya Deflaizar dari FKUB Provinsi juga mempertanyakan usaha-uHasa apa saja yang sudah dilakukan oleh FKUB kota Bukittinggi untuk mengatasi persoalan gereja yang tidak resmi itu. Menurut Zulfikar, di Bukittinggi untuk

mendirikan Mushalla saja harus ada rekomendasi dari FKUB.

Terkait dengan kondisi FKUB kota Bukittinggi, menurut Ketua FKUB kota Bukittinggi, Prof. Abdul Rahman Ritongan, alhamdulillah situasi kerukunan umat beragama di Bukittinggi aman-aman saja. Kepengurusan FKUB lengkap. Di dalam kepengurusan FKUB hanya satu orang wakil agama non muslim yaitu Antonius Didik Trianto dari Katolik.

Kegiatan FKUB kota Bukittinggi terdiri dari: 1. Melakukan studi banding ke kabupaten Kampar, Riau. 2. Acara malam kebersamaan pada tanggal 2 Desember 2020 yang diadakan pada sebuah restoran, dihadiri oleh unsur-unsur pejabat pemerintahan dan tokoh agama. 3. Kegiatan membagikan masker kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian FKUB dalam mengatasi meluasnya wabah pandemi kovod-19. 4. Jalan-jalan santai kerukunan yang diadakan sebelum terjadinya wabah pandemi covid-19.

Mengenai anggaran FKUB tahun 2020 hanya 20 juta ditambah 30 juta dari Pemkot. Sedangkan untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar 60 juta. Menurut Muzahar dari Kesbangpol provinsi yang juga hadir dalam kegiatan itu, kedepannya Mendagri sudah menginstruksikan kepada gubernur dan Bupati/Wako supaya menganggarkan biaya untuk FKUB di daerahnya. Jika Kepala daerah yang bersangkutan enggan menyiapkan anggaran untuk FKUBnya maka anggarannya tidak akan disahkan.

Pertemuan dengan Kakan Kemenag dan Pengurus FKUB Kota Payakumbuh. Dalam pertemuan dengan Kemenag dan FKUB yang bertempat di kantor kementerian Agama kota Payakumbuh diperoleh keterangan dari Herman Ali, ketua FKUB kota Payakumbuh, bahwa FKUB kota Payakumbuh sudah mengadakan Rapat Pengamanan

Natal guna mengantisipasi terjadinya gangguan yang berpotensi merusak kerukunan umat bergama pada saat saudara kita dari umat Kristiani melaksanakan Ibadah Natalan dan peringatan tahun baru 2021.

Terkait dengan rumah ibadah non muslim di Payakumbuh menurutnya hanya satu yaitu gereja Betel di Kampung Cina. Tapi selain itu ada juga tempat-tempat ibadah mereka seperti di Batalion ada dua yakni untuk Katolik dan Protestan. Mereka akan mengadakan acara natalan mulai malam ini sampai hari besok. Terkait dengan masalah keamanan, Kapolres telah mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas misalnya dengan menertibkan parkir dengan melarang memarkir kendaraan bermotor di pinggir jalan dan mengarahkannya ke pekarangan Balai Kota Payakumbuh.

Untuk pengamanan dalam rangka menyambut tahun baru 2021 Pemko Payakumbuh menutup tempat-tempat wisata mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Herman juga menjelaskan bahwa dalam peringatan natal tahun ini umat Kristiani juga tidak memakai atribut keagamaan demi menjaga kerukunan dengan umat lain. Pada tahun 2019 pernah ada kasus yang berpotensi merusak kerukunan yaitu seorang oknum polisi dari umat Kristiani membuat pohon natal dengan menyalakan lampu warna warni pada sebatang pohon kayu lalu masyarakat memprotesnya akhirnya terpaksa dihentikan kegiatan semacam itu.

#### **B. MENCERMATI ALIRAN SEMPALAN**

Menurut ketua FKUB kota Payakumbuh, dulu pada tahun 90-an di Payakumbuh pernah ada sebuah aliran keagamaan yang menamakan diri Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, berpusat di mushalla sebuah toko di Ngalau yang berasal dari Batam. Salah satu ajarannya yakni memandang foto guru sebelum

mengerjakan shalat. Keluar dari ruangan ibadah harus dengan berjalan mundur.

Selain itu, di Payakumbuh juga ada LDII tapi kini para pengikutnya sudah menyatakan diri kembali ke khittahnya, namun menurut Herman, dalam kenyataannya tidak. Ahmad Kosasih dari FKUB Provinsi menanyakan apakah aliran Thariqat dan LDDI itu masih ada sampai sekarang, beliau menjawab tidak ada. Juga ada pertanyaan dari salah seorang tentang LGBT dan prostitusi, apakah memang ada di Kota Payakumbuh sebagaimana yang diberitakan oleh media sebelum ini. Ketua FKUB itu mengakui bahwa dulu memang pernah ada tapi sudah dilakukan tindakan oleh Satpol PP sehingga kini sudah tidak ada lagi.

Terkait dengan Anggaran FKUB, kemenag menganggarkan 50 juta. Adapun menyangkut dengan kegiatan FKUB kota Payakumbuh, pada awal tahun 2020 sudah diadakan kegiatan sosialisasi tentang moderasi beragama bagi kaum remaja dan pelajar. Ibu Ida dari Kanwil Kemenag Sumbar menyarankan perlu adanya regenerasi pengurus FKUB terhadap pemuda. Demikian sekedar catatan kecil saya sebagai salah seorang anggota Tim untuk dapat ditambahkan ke dalam laporan akhir kegiatan FKUB Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat Air Tawar Barat 25/12/2020. Ahmad Kosasih

### C. FKUB DI PESISIR SELATAN BELUM WAKTUNYA<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Pertemuan Fkub Sumbar Dengan Tokoh Masyarakat Pessel Tanggal 12 Desember 2020 di Aula Kantor Bupati Painan. **Susunan Acara**, Pembukaan Kesbangpol Pessel. Paparan oleh Ketua FKUB Sumbar Prof. Duski Samad, M. Ag, Sambutan PJS Bupati Pessel Mardi dan Dialog Tokoh. Ketua LKAAM (Ali Sahur Dt. Bdr. Jambak, SH). Mewakili Kemenag Pessel (Sudirman). Nahdhatul Ulama (Yoserizal). Tokoh Masyarakat Pessel. Muhammadiyah (Lukman Hakim). MUI Pessel (Asli Saan). Kesbangpol Pessel (Edi Darma Putra). Ormas Milenial (anak muda nama tidak dikenal). Buya Marlius

Dalam sambutan dan paparannya, Prof. Duski Samad (Ketua FKUB Sumbar) mengemukakan bahwa ada tiga agenda dialog kita hari ini yakni: **Pertama** menyangkut sikap kita dalam menghadapi pandemic covid 19. **Kedua** sikap kita dalam menghadapi pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 9 Desember 2020. **Ketiga**, terkait dengan hasil Rakornas FKUB. Terkait dengan covid 19 yang sedang melanda negeri kita saat ini mari kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita dengan sama-sama mematuhi protocol kesehatan. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pilkada mari kita sama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan menggunakan hak pilih yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Jangan bersikap golput karena golput adalah sikap yang kurang baik dalam partisipasi kita sebagai warga Negara.

Adapun yang menyangkut FKUB, Duski menjelaskan kami dari Tim yang datang ini terdiri dari unsur Kesbangpol dan pengurus FKUB Sumbar. Kami ingin menyampaikan amanah dari Rakornas FKUB bahwa sampai saat ini masih ada tiga daerah tingka dua yang belum ada FKUB nya. Ketiga daerah itu terdiri dari satu daerah Kabupaten Puncak Jayawijaya Provinsis Papua dan dua dalam wilayah provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar dan kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan FKUB adalah melakukan pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama dalam wilayah kerjanya, bukan melakukan pembinaan. Pada dasarnya FKUB membantu pemerintah setempat dalam memelihara kerukunan. Berdiri atau tidaknya FKUB dalam suatu daerah adalah kewenangan masyarakat sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi.

---

(Mantan Kesra). Ketua FKUB SB memberikan klarifikasi (tabayun). FKUB SB (Ahmad Kosasih) memberikan tanggapan. Asisisten 1 Pemkab Pessel memberikan closing statemen.

Bupati Pessel dalam sambutannya yang disampaikan oleh PJS Bupati, bapak Mardi, menyampaikan Selamat Datang kepada para tamu yang datang dari Padang. Menurut penduduk Pessel saat ini berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, hanya 0,1 persen yang non-muslim. Ketua LKAAM Pessel, Ali Sahur Dt. Bdr. Jambak, SH mengatakan kami di Pessel menganut falsafah ABS-SBK. Beliau menyayangkan bahwa di Sago saat ini sudah 82 rumah umat Kristen. Mereka pada umumnya adalah dari suku Batak yang berprofesi sebagai tukang kredit. Beliau menyesalkan hal itu merupakan kelalaian ninik mamak waktu itu dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat. Karena pada masa itu dalam hal pensertifikatan tanah sering mengabaikan peran ninik mamak. Di Kambang dulu pernah berdiri gereja dan terjadi pembakaran oleh masyarakat setempat di masa pemerintahan bupati Ismail Lengah yang mana Dandim dan Kapolresnya saat itu dari kalangan non-muslim. Fenomena lain seperti beliau paparkan bahwa di Sago juga ada GAFATAR dan suatu ajaran dimana orang shalat dalam keadaan bertelanjang. Pada sisi lain Ali Sahur juga mempertanyakan tentang AD/ART FKUB tapi disisi lain ia mengusulkan agar dimasukkan tokoh adat ke dalam FKUB itu.

Sudirman mewakili Kemenag mengatakan ada informasi tentang rumah ibadah Kristen di Silaut. Bahwa di Silaut sudah berdiri tiga rumah ibadah, tapi setelah ditelusuri ternyata tidak ada, hanya rumah penduduk yang digunakan sebagai tempat ibadah, sedangkan masyarakat setempat tidak pernah mengakui bahwa itu adalah gereja. Dulu ada perjanjian dengan ninik mamak setempat bahwa transmigrasi yang dikriim ke sana harus yang beragama Islam ternyata ada 9 KK ber KTP non muslim. Anehnya mereka meminta pendirian rumah ibadah bahkan pernah meminta guru agama Kristen kepada Kemenag. Atas dasar ini maka terbentuk persepsi

masyarakat bahwa FKUB adalah peluang bagi umat Kristen. Karena itu, mohon kepada pihak Pemda dan FKUB untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang FKUB itu. Senada dengan tokoh-tokoh lain, Yoserizal dari NU juga mengatakan, FKUB adalah pintu masuk bagi agama lain. Silakan menumpang hidup di Pesisir Selatan tapi jangan menjadi penduduk Pesisir Selatan. \

Senada dengan NU, Lukman Hakim dari Muhammadiyah juga menyangsikan keberadaan FKUB sebagai pintu masuk atau peluang bagi umat Kristen. Karena itu ia menyatakan tidak setuju dengan berdirinya FKUB itu di Pessel.

Sementara itu Ketua MUI Pessel, Asli Saan mengatakan, dari inti pembicaraan sebelumnya “kilek camin lah kamuko, kilek baliuang lah ka kaki”. Keputusan terakhir tentang pendirian FKUB di Pessel ada pada Bupati, namun beliau minta saran kepada masyarakat. Demikian ketua MUI itu mengomentarnya. Selanjutnya seorang pembicara mewakili ormas menyampaikan kritiknya terhadap buku regulasi FKUB. Bahwa konsideran di buku ini kurang jelas karena tidak pakai kata “menimbang” di dalamnya.

Demikian komentar dari seorang pembicara yang juga menyebut diri sebagai wakil kaum milenial itu. Akhirnya Edi Darma Putra dari Kesbangpol memandangi pembicaraan kita sekarang ini ibarat CBLK (Cinta Lama Bersemi Kembali) dan luka lama. Menurutnya juga, pemerintah melihat ini suatu keharusan sementara di pihak masyarakat ada ABS-SBK. Oleh karenanya kita harus duduk bersama lagi membicarakan hal ini untuk mencari kemufakatan. Tapi jika hari ini kita bentuk FKUB akan “digoreng” orang seakan-akan Bupati memberi peluang bagi non Muslim masuk ke Pessel karena kita akan pilkada.

Agak berbeda dari pembicara sebelumnya, Ahmad Kosasih, wakil ketua FKUB Sumbar menanggapi para pembicara sebelumnya. “Saya sangat gembira dan merasa bangga mendengar semangat bapak-bapak para tokoh Pesel hari ini dalam membela Islam. Andaikata semangat seperti ini muncul 40 tahun yang lalu tentu tidak akan ada angka 0,1 persen dari 500.000 berarti 500 orang penduduk Pesel adalah non Muslim sebagaimana dipaparkan oleh bapak PJS Bupati dalam sambutannya tadi. Begitu juga yang dikemukakan oleh bapak Datuak Bdr. Jambak (ketua LKAAM) tadi bahwa di Sago sudah berdiri gereja. Bukankah berdirinya pada tanah ulayat dalam wilayah kekuasaan ninik mamak? Kemana saja LKAAM, NU, Muhammadiyah dan tokoh-tokoh lain saat itu? Itulah yang dipertanyakan oleh putra Pessel itu. Kepada bapak yang dari Kemenag saya ingatkan bahwa kedatangan pak Nipasri ke Pessel pada beberapa waktu lalu itu adalah atas nama KAPUS KUB sedangkan Kapus KUB itu merupakan lembaga organik di Kementerian Agama.

Lebih lanjut ia katakan, mari kita pertimbangkan lagi kedepannya, jangan langsung ditolak dan harus kita perhitungkan dulu manfaat dan mudaratnya. Jika besar manfaat dari pada mudaratnya kita ambil. Tapi jika toh besar mudaratnya ketimbang manfaatnya ya kita tolak. Ibarat kata papatah “*Di baliek-baliek bagai kan memanggang; Elok diambiek jo mupakek, buruak dibuang jo etongan; Kok manih jan capek dilulue, kok paik jan capek diludahkan*”.

Akhirnya Prof. Duski Ketua FKUB Sumbar memberikan tabayun bahwa FKUB itu dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah telah membuat regulasinya yakni buku tersebut, itulah AD/ART FKUB. Kekhawatiran-kekhawatiran dan pemahaman bapak yang disampaikan sebelumnya baru merupakan persepsi. Maka forum ini sebenarnya adalah untuk mendialogkan dua hal saja yakni jika ada masalah dan bagaimana jalan



penyelesaiannya. Dalam closing statemennya bapak dari Asisten I Pemkab Pesel selaku moderator dalam acara dialog itu mengatakan belum waktunya FKUB di Pessel.

#### **D. FKUB DI KABUPATEN SOLOK SELATAN <sup>12</sup>**

Pada jam 04.30 Selasa tanggal 4 Nopember 2020, sebuah minibus Panther yang telah disiapkan oleh pihak Kesbangpol meluncur dari kantor FKUB Sumbar, Jalan Kuini Padang. Sampai di Lubuk Selasih Tim berhenti untuk menunaikan shalat subuh di sebuah masjid.

Selesai shalat, mobil melanjutkan perjalanannya melintasi lorong-lorong pebukitan serta tepi danau Diateh nan Indah dan singgah di *Mitra Rest Area*, sebuah kawasan rumah makan, untuk sarapan sekadar antisipasi P3K (Pertolongan Pertama Perut Keroncngan) karena perjalanan masih panjang lagi menuju Padang Aro kabupaten Solok Selatan. Selesai sarapan kami melanjutkan perjalanan sehingga sampai di lokasi yaitu Kantor Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan, Padang Aro pada jam 09.30.

Perjalanan selama lima jam itu Alhamdulillah dapat ditempuh dengan aman dan lancar hampr tanpa kendala. Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan yaitu penyerapan informasi dan aspirasi dari masyarakat Solsel serta pembinaan melalui paparan dan penjelasan oleh para narasumber terkait dengan masalah kerukunan umat beragama serta tugas dan fungsi FKUB.

Perjalanan kembali ke Padang dimulai sehabis shalat ashar berjamaah di mushalla kantor Kemenag Solsel sekitar pukul 16.00 WIB. Tiba di Alahan Panjang masuklah waktu magrib, Tim melaksanakan shalat

---

<sup>12</sup> Laporan Singkat, Kegiatan Workshop Pembinaan Pengurus Fkub Kabupaten/Kota, Di Kabupaten Solok Selatan, Tanggal 4 Nopember 2020

magrib di sebuah masjid. Sehabis shalat magrib kami meneruskan perjalanan sehingga sekitar pukul 20.00 WIB kami berhenti di salah satu rumah makan dalam kawasan antara Lubuk Selasih dan Lubuk Paraku. Di situ kami makan malam. Sekitar pukul 21.00 sampai di kota Padang dan semua anggota Tim dihantar oleh sopir menuju kediaman masing-masing. Alhamdulillah perjalanan TIM FKUB tanggal 4 Nopember di kabupaten Solsel berjalan dengan aman dan lancar sebagaimana yang direncanakan.

Maka dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa serta salawat dan salam buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW saya awali laporan ini. Laporan ini adalah laporan kunjungan Tim FKUB Sumbar ke kabupaten Solok Selatan pada tanggal 4 Nopember 2020 berdasarkan surat tugas nomor: 050/STG/ FKUB/ SB/ XI/2020 dalam rangka melaksanakan pembinaan dan Workshop terkait dengan tugas dan fungsi pokok Forum Kerukunan Umat Beragama. Secara rinci laporan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **MATERI PEMBINAAN**

Paparan pembinaa oleh tiga nara sumber secara bergantian dengan judul sebagai berikut;(a). *“Pemberdayaan Peranan FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Hidup Umat Beragama”* dengan narasumber: Dr. H. Ahmad Kosasih, M. Ag.(b). *“Konfigurasi Ancaman Sosial Kemasyarakatan yang dapat Menggerus Kerukunan Umat Beragama dan Kerukunan Nasional Serta Solusinya”* dengan narasumber: Drs. H. Bakhtiar, M. Ag.(c) *“Peranan Strategis Tokoh Agama Dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama pada Bangsa yang Mejemuk”* dengan narasumber: Drs. H. Adi Bermasa. Bertindak sebagai Moderator: Dr. Rosmiati Hakim, M. Ag.

Diskusi/tanya jawab memunculkan isu yang berkembang dalam diskusi sebagai berikut:

**a. Permasalahan yang muncul di luar aspek keagamaan**

Adapun isu yang berkaitan dengan potensi konflik di kabupaten Solok Selatan diluar aspek keagamaan antara lain adalah persoalan tanah. Dalam wilayah kabupaten Solok Selatan konon terdapat sembilan perusahaan besar berbentuk PT. Perusahaan tersebut umumnya bergerak di bidang perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka persoalan yang menonjol adalah hak-hak atas tanah baik yang menyangkut hak kepemilikan maupun hak pakai yang belum begitu jelas statusnya. Tanah/lahan tersebut pada dasarnya adalah harta ulayat kaum dan ulayat Nagari di Solok Selatan sedangkan para pemilik dan pengelola serta para pekerja di perusahaan itu adalah orang-orang pendatang dari luar provinsi Sumbar.

Menurut informasi yang diperoleh dalam diskusi masyarakat sangat menginginkan agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan oleh Pemko setempat. Sebab, jika tidak segera diselesaikan dan dicarikan solusinya hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik social yang dapat mengganggu kerukunan yang pada akhirnya dapat memecah kesatuan bangsa. Padahal, menurut informasi yang diperoleh dari B. Dt. Panduko Alat yang kebetulan adalah pengurus KAN Solok Selatan, sebelum perusahaan itu didirikan sudah ada semacam perjanjian kesepakatan (MoU) antara pihak perusahaan dan tokoh-tokoh nagari dan adat setempat. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa perekrutan karyawan harus didominasi oleh warga Solok Selatan. Tapi sebelum perjanjian itu dipenuhi perusahaan sudah berpindah tangan dengan menjualnya ke pihak lain.

**b. Permasalahan yang muncul dalam aspek keagamaan**

Persoalan yang muncul dari aspek keagamaan dapat pula dibedakan dalam dua bidang yakni bidang kerukunan antar umat beragama dan interen umat beragama. Adapun kehidupan antar umat berbeda agama sampai saat itu tidak ada masalah yang menonjol. Meskipun di Solsel terdapat penganut agama Kristen dan mereka pada umumnya adalah pendatang yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh PT. Huberta yang bergerak di bidang pengolahan teh, kebanyakan pekerjanya adalah orang-orang Nias yang beragama non muslim. Mereka adalah buruh harian lepas (BHL). Namun sampai saat itu (dalam diskusi), belum ada laporan terkait dengan gangguan kerukunan antar umat beragama. Dengan kata lain, belum ada persoalan yang menonjol antara penduduk asli Solsel yang menganut Islam (muslim) dengan umat agama lain.

Berkaitan dengan kerukunan hidup interen umat beragama dalam diskusi ditemukan beberapa masalah yaitu:

(1) Masalah pendirian rumah ibadah Islam.

Menurut informasi yang diterima dari Yulkisra, Kepala KUA kecamatan KPGD, masalah yang terjadi di wilayah kerjanya adanya konflik antara pengurus masjid dan mushalla yang baru didirikan. Bahwa pengurus masjid tidak mau memberi rekomendasi kepada pengurus mushalla tentang pendirian dan pengoperasian mushalla tersebut sedangkan kegiatan mushalla sudah berlangsung sebagai tempat shalat berjemaah dan wirid-wirid pengajian. Jarak antara masjid dan mushalla kurang lebih 0,5 (setengah) kilometer. Selain itu menurut informasi dari Buya Drs. Arwandi, dalam Kenagarian Lubuk Gadang kecamatan Sangir juga terdapat satu jorong dengan tiga masjid. Namun dia juga tidak menjelaskan sejauh mana hal itu telah mengganggu kerukunan umat Islam setempat.

(2) Masalah aliran menyimpang (aliran sempalan)

Di Solsel terindikasi adanya beberapa aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Aliran-aliran tersebut adalah:

(a) *Tariqat Naqsyabandiyah Al-Barakah Mu'tabarah*

Adanya laporan bahwa di kematan KPGB terdapat jemaah aliran Tariqat Naqsyabandiyah Al-Barakah Mu'tabarah yang sistim pengajiannya dari rumah kerumah. Ini menimbulkan kecurigaan warga setempat yang berpotensi mengganggu dan merusak kerukunan interen umat Islam.

(b) *LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia)*

Di kecamatan Sungai Pagu terindikasi adanya LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia) yang selama ini terindikasi mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan sumber pokok ajaran Islam, Al-Qur`an dan Sunnah. Mereka sudah berencana untuk mendirikan masjid.

(c) *Majelis Tafsir Al-Qur`an*

Di kecamatan Pauh Duo terdapat Majelis Tafsir Al-Qur`an yang dalam menafsirkan Al-Qur`an mereka tidak mau menggunakan hadis Nabi SAW. Padahal para penafsir (mufassir) terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak meninggalkan sama sekali hadis-hadis Nabi. Juga dalam kajian Ilmu Tafsir/Ulumul Qur`an penggunaan hadis-hadis nabi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan karena umat Islam meyakini bahwa hadis/sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam sesudah Al-Qur'an.

(d) *Aliran Ahmadiyah*

Menurut informasi yang diperoleh dari Buya Drs. Arwandi, di kecamatan Sangir terdapat Ahmadiyah. Namun pada saat itu dia tidak

menjelaskan lebih jauh tentang kegiatan Ahmadiyah tersebut dan gangguannya kepada masyarakat setempat.

Pelaksanaan acara berjalan dengan lancar, sambutan dari Kepala Kemenag Kabupaten Sosel cukup hangat dan layanannya cukup bagus penuh persahabatan. Begitu pula dengan diskusinya berjalan alot penuh dinamika dan banyak menyerap informasi dari lapangan karena pesertanya adalah representasi dari berbagai unsur pimpinan informal dalam masyarakat. Mulai dari unsur ninik mamak, cerdik pandai, ormas-ormas keagamaan Islam, MUI, FKUB sampai kepada unsur dari Kesbangpol dan Kemenag. Terlihat juga hadir seorang anggota Polri mewakili aparat keamanan. Demikianlah laporan ini kami sampaikan semoga bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas FKUB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat, khususnya kabupaten Solok Selatan. Padang, 11 Nopember 2020.

#### E. MERAJUT DAN MEMELIHARA UKHUWAH<sup>13</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي

عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً

قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (رواه الترمذی)

---

<sup>13</sup>Ringkasan materi Nuanasa Iman di TVRI SUMBAR, Jumat tanggal 15 Maret 2019.

*Dari Abdullah bin Umar katanya, Rasulullah, Saw bersabda: Dan sesungguhnya Bani Israil telah terpecah menjadi tujuh puluh dua millah, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga millah, semuanya berada di neraka kecuali satu millah. Mereka (para sahabat) bertanya: Siapakah di antara ya Rasulullah? Rasulullah berkata: yaitu apa yang aku dan para sahabatku jalani (H.R. Tirmizi, CD ROM "Al-Mauwsu'ah al-Hadits al-Syarif" No. 2565*

Perbedaan paham, pendapat atau aliran bahkan keyakinan (agama) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri. Islam sebagai agama universal dan berwatak damai menghargai adanya perbedaan itu karena perbedaan merupakan *sunnatullah* (ketentuan Allah) yang berlaku secara tetap dan pasti. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (plural) yang di dalamnya terdapat beragam agama, keyakinan dan sekte (*firqah*). Tulisan ini mencoba menelusuri konsep-konsep Islam tentang kemajemukan dan bagaimana kiat-kiat menjaga atau memelihara kerukunan di dalam kemajemukan itu guna mencapai masyarakat yang damai. Baik kerukunan interen umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat agama lainnya.

### **Pengertian Ukhuwah**

Kata ukhuwah (أُخُوَّةٌ) makna dasarnya ialah "memperhatikan", hal ini member kesan bhw persaudaraan muncul karena adanya rasa saling memperhatikan antara yang satu dan yang lainnya. Perhatian itu bisa muncul disebabkan adanya persamaan, misalnya dari garis keturunan, tempat lahir (tumpah darah), kebangsaan dan agama. Orang satu garis keturunan disebut bersaudara misalnya saudara seayah, seibu, senenek dst. Ada saudara sekampung, ada saudara sebangsa dan ada saudara seiman.

### **Bentuk-Bentuk Persaudaraan dalam Al-Qur`an**

Bila kita mencermati ayat-ayat Al-Qur`an tentang persaudaraan akan kita temukan beberapa bentuk persaudaraan yang ditunjukkan oleh Islam, antara lain: (1) Persaudaraan yang diikat oleh garis keturunan (Q.S. An-Nisa`:23). (2) Persaudaraan yang diikat oleh rasa sekaum atau sebangsa (Q.S.Al-A`raf:65). (3) Persaudaraan yang diikat oleh rasa seakidah atau seagama (Q.S.Al-Hujurat:10).

#### 1. Persaudaraan Nasab

Adapun persaudaraan dalam bentuk pertama itu diikat oleh pertalian darah yang di dalam hukum Islam berimplikasi pada hak kewarisan (saling mewarisi), dan haramnya saling menikahi antara individu yang bersaudara itu.

#### 2. Persaudaraan Kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah)

Persaudaraan yang diikat oleh rasa sebangsa mungkin saja tidak ada pertalian darah yang jelas namun persaudaraan itu dapat diikat oleh perasaan senasib sepenanggungan, meskipun berbeda suku, ras, bahasa dan bahkan agama, seperti bangsa Indonesia.

#### 3. Persadaraan kemanusiaan (ukhuwah Insaniyyah)

Umat manusia itu berada dalam satu persaudaraan, karenanya kita dianjurkan agar saling mengenal antar suku dan bangsa yang berbeda-beda (Q.S. Al-Hujurat/49:13):

#### 4. Persadaraan seiman (ukhuwah imaniyyah)

Sedangkan persaudaraan antara umat seagama (Islam) yang lazim kita sebut ukhuwah islamiyah, adalah persaudaraan yang diikat bukan saja oleh kedua ikatan persaudaraan sebagaimana disebutkan di atas tapi juga oleh ikatan rasa seagama dan seakidah. Tapi boleh jadi juga persaudaraan ini hanya diikat oleh agama meskipun berlainan bangsa, ras dan bahasa. Bahkan dari sentimen



keberagaman, ikatan seagama itu terasa lebih kuat. Misalnya ketika kita berjumpa dengan seseorang yang belum kita kenal lantaran perberbedaan bangsa, bahasa dan ras, lalu dia mengucapkan salam kepada kita secara Islam, maka pada saat itu hati kita terasa bergetar dan rasa persaudaraanpun akan segera muncul secara spontan. Contoh sewaktu kita berada di Mekah dan Medinah pada musim haji. Persaudaraan semacam ini bukan saja diikat oleh kedua ikatan persaudaraan sebagaimana disebutkan di atas tapi juga oleh ikatan rasa seagama dan seakidah.

### **Perbedaan dalam Islam**

#### **Ada dua jenis perbedaan dalam Islam**

1. Perbedaan Fundamental; yaitu yang berkaitan dengan pokok keimanan/akidah (Ushuluddin). Ini tidak diperbolehkan. Misalnya tidak mempercayai akhirat. Ini sifatnya prinsip keyakinan yang tidak boleh ditinggalkan.
2. Perbedaan Instrumental; tentang hal-hal yang di luar akidah seperti teknik dalam ibadah atau muamalah. Bentuk perbedaan dalam hal ibadah itu al:
  - a. Khilafiah. Perbedaan ini biasanya muncul karena perbedaan tafsiran atau mazhab yang dianut.
  - b. Tanawwu` (keragaman). Keragaman cara beribadah (*tanawwu' al -'ibadah*). Islam mengakui adanya keragaman dalam cara-cara atau teknik pelaksanaan ibadah sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Saw yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua keragaman itu selama semuanya merujuk kepada Rasulullah Saw.

Konsep-konsep di atas apabila dipahami dengan baik akan mengantarkan umat Islam kepada kerukunan dan kedamaian dalam pelaksanaan ajaran Islam. Perbedaan-

perbedaan yang bersifat *furu'iyah* itu akan dapat dipandang sebagai kekayaan khazanah intelektual Islam masalah yang seharusnya menjadi kebanggaan, bukan dipandang sebagai pangkal perpecah-belahan yang cenderung merugikan Islam dan umat Islam itu sendiri. Bukankah menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan serta menghindari permusuhan suatu kewajiban? (Q.S.3:103).

### **Cara Membangun/Merajut Ukhuwah**

Empat tahapan dalam membina ukhuwah: Ta'aruf/ berkenalan (Q.S.Al-Hujurat/49:13; S.Ar-Rum/30:22). (2) *tafahum* yaitu saling memahami (3) *tasamuh* yaitu saling toleransi, (4) *ta'awun* yaitu saling menolong, dan (5) *takaful* yaitu saling menjamin. Enam cara memelihara Ukhuwah (Q.S. Al-Hujurat/49:11-12).

1. Jangan saling merendahkan
2. Jangan menghina/mencela
3. Jangan member gelaran yang tidak baik
4. Jauhi prasangka yang berlebihan
5. Jauhi mencari-cari kelemahan seseorang (*tajassus*)
6. Jangan berbuat ghibah (bergunjing)

Untuk mewujudkan persaudaraan antara pemeluk agama yang berbeda kita disuruh untuk saling menghormati selama mereka yang berbeda agama tersebut tidak menampakkan permusuhan atau perlawanannya terhadap umat Islam (Q.S.Al-Mumtahanah:8-9). *Larangan mencela sembah (keyakinan) orang lain*. Islam melarang umatnya mencela sembah umat lain sebab, bila kita mencela sembah dan keyakinan seseorang, mereka juga akan membalasnya dengan mencela Allah (Q.S.Al-An'am:108).

### **KESIMPULAN**

1. Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar patuh, tunduk serta berserah diri setulus-tulusnya kepada Allah Swt. Dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip serta norma-norma Islam manusia

dapat menciptakan hubungan yang intensif dengan Yang Maha Kuasa, harmoni dengan sesama manusia serta serasi dan selaras dengan alam atau lingkungannya untuk meraih keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

2. Perbedaan dalam pandangan Islam sebuah keniscayaan karena itu adalah takdir Allah. Mari kita saling menghormati perbedaan tersebut secara arif bijaksana untuk memelihara kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Perbedaan dalam Islam terdiri dari perbedaan yang bersifat fundamental dan perbedaan yang bersifat instrumental. Khusus untuk perbedaan yang fundamental kita harus sepakat, sedangkan tentang perbedaan yang bersifat instrumental kita sepakat untuk berbeda.

#### **F. KERUKUNAN DALAM BINGKAI NKRI**

Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai sebuah bangsa dengan corak masyarakat yang majemuk (*pluralistic society*). Secara geografis negara Indonesia terdiri dari 134.767 pulau dengan penduduk kurang lebih 225 juta, 370 suku bangsa dan lebih dari 67 bahasa daerah. Dari segi etnik, penduduk Indonesia terdiri dari beragam etnik seperti etnik Melayu, Arab, India, Tionghoa, dan Negrito. Mereka hidup dalam sebuah wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang lebih populer dengan singkatan NKRI.

Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keanekaragaman Agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Agama adalah hak asasi yang paling mendasar dalam diri manusia. Setiap orang berhak menentukan pilihan agama/keyakinannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Hal-hal

yang menghalangi seseorang untuk menganut serta melaksanakan kewajiban agamanya adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu sendiri. Meskipun demikian, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus pula memperhatikan rambu-rambu yang mengatur. Apalagi penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam agama/kepercayaan. Bila tidak, maka agama yang semestinya memberikan kedamaian akan berubah menjadi ajang pemicu terjadinya konflik serta pertikaian yang berujung dengan perpecahbelahan.

Suatu hal yang memprihatinkan kita sejak reformasi bergulir hampir dua dasawarsa yang lalu, bahwa Indonesia sering dilanda oleh berbagai krisis, konflik dan pertikaian. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial bahkan agama. Reformasi, selain telah memberikan nilai-nilai positif juga membawa ekses negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi kita merasa gembira dengan terbukanya kran kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud dari sebuah negara demokrasi.

Namun disisi lain kita juga turut merasa prihatin, demokrasi yang seharusnya menjadi sarana penyampaian aspirasi telah berubah menjadi perlombaan interupsi, yang terkadang hanya untuk sekedar "penampakan" atau aktualisasi diri atau menampakan sikap empati. Kebebasan berekspresi dan berpendapat kini sudah berubah menjadi kebablasan, sehingga terjadi saling menghujat dan saling menggugat. Demokrasi seakan-akan dimaknai dengan banyaknya demonstrasi, sehingga demokrasi dapat berubah menjadi *democrazi* (sebuah lelucon) seperti yang kita saksikan di layar televisi. Fenomena ini seperti sebuah tontonan gratis serta hiburan bagi rakyat yang tengah dilanda oleh berbagai krisis. Mencermati hal itu semua, kita perlu memperhatikan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila dan ajaran Agama. Di antara nilai-nilai tersebut adalah toleransi dan kerukunan.

Di dalam buku Diskursus Kerukunan Antarumat Beragama Perspektif Islam halaman 72 disebutkan bahwa toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Toleransi jugadapat diartikan sebagai “sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda”.

Toleransi tidak saja saling menghormati agama dan keyakinan yang berbeda tapi juga saling berkerja sama bahu membahu untuk menciptakan kesejahteraan serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam toleransi terkandung makna saling peduli serta berempati terhadap nasib dan penderitaan orang lain yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu baik dari segi suku, warna kulit, bahasa, adat istiadat maupun agama. Sedangkan kerukunan dapat diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, saling menghormati dan menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai ajaran agama dan keberibadian Pancasila.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 halaman 12 disebutkan, kerukunan umat beragama adalah “keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Tentu saja sesuatu yang dikerjasamakan itu sepanjang tidak mengintervensi wilayah keyakinan (iman) dan ibadah masing-masing agama. Sebagai ilustrasi tentang

toleransi yang kebablasan itu adalah dua orang berteman akrab tapi berbeda selera atau kecenderungan. Yang satu suka minum teh dan yang satu lagi suka minum kopi. Orang yang suka kepada the itu mengatakan kepada temannya, "mari saya masukkan teh saya ke dalam kopimu dan kamu masukkan pola kopi kamu dalam air teh saya biar kita sama-sama menikmati".

Toleransi semacam ini jelas tidak lagi memberikan kenyamanan kepada masing-masing yang berbeda tapi malah akan mengganggu perasaan masing-masing. Hal semacam itu tidak tepat lagi disebut toleransi tapi lebih tepat disebut intervensi berselimut toleransi sebab kenikmatan kopi akan dirusak oleh teh, begitupa pula sebaliknya. Di dalam ajaran Islam hal tersebut cukup jelas dan tegas seperti tertera dalam kitab suci Al-Qur`an surat Al-Kafirun ayat 6: "*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*".

Begitulah dalam beragama, wilayah keyakinan (iman) merupakan hal yang amat sakral dan sensitif untuk disentuh. Ia terkadang tidak terlalu hirau dengan perhitungan logika formal atau nalar tapi lebih bertumpu pada hati dalam keasyikan bermakrifat serta bermunajat kepada sang Khalik (Tuhan). Maka dalam konteks kerukunan, perbuatan atau narasi-narasi yang bertujuan menggugat keyakinan beragama seseorang sangat berpotensi merusak toleransi itu sendiri yang pada akhirnya akan menggoyahkan sendi-sendi kerukunan hidup antara umat beragama. Bukankah di dalam Islam juga ada larangan mencela sembahsan umat agama lain? (Q.S.Al-An'am:108). Sebaliknya, toleransi dan kerukunan akan semakin kuat manakala masing-masing pihak yang berbeda tidak saling *mencikarai* (mencampuri) wilayah keyakinan masing-masing agama.

Kita tidak perlu khawatir, kita harus selalu optimis dan bersyukur karena kita masih memiliki Pancasila sebagai

dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Kita harus optimis karena kita masih punya Agama sebagai pedoman dan pegangan hidup, baik kehidupan individu maupun masyarakat, dunia dan akhirat. Pancasila dan agama memang dua entitas yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Apalagi bagi kita umat Muslim, Islam adalah agama yang menebarkan rahmat kepada alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada umatnya, namun harus bersikap tegas dalam memberantas kemaksiatan dan kemungkaran. Salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang menerbarkan rahmat ialah sikap toleransinya kepada umat lain. Sikap toleransi tersebut ditandai dengan perintah berlaku adil dan berbuat baik kepada umat non Muslim yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat atau negara. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دُونِ دِينِكُمْ ظِلْمًا ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (S. Al-Mumtahanah:8).

Mufassir **Ibnu Katsir** menjelaskan ayat ini sebagai berikut. Bahwa Allah Swt tidak melarang kamu berbuat ihsan (kebaikan) kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agamamu yaitu kaum perempuan dan orang-orang yang lemah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diceritakan bahwa

Qutailah (ibunda Asma` putri Abu Bakar) datang kepada anaknya, Asma`, dengan membawa sejumlah hadiah, tetapi Asma` enggan menerimanya karena ibunya itu seorang musyrik. Lalu 'Aisyah menayakan hal itu kepada Nabi Saw. Berdasarkan peristiwa itu, turunlah ayat ini. Maka Nabi menyuruhnya untuk menerima hadiah tersebut. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap toleransi terhadap non muslim (Lihat *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. III, hlm. 392).

Toleransi menurut Al-Qur`an didasarkan atas asas persaudaraan yang dikenal dengan ukhuwah islamiyah. Konsep ukhuwah Islamiyah menurut Al-Qur`an itu meliputi; ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), ukhuwah wathoniyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwah imaniyah (persaudaraan seiman atau persaudaraan interen umat Islam). Islam memandang bahwa umat manusia pada umumnya adalah bersaudara karena terlahir dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*".

Berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa Islam mengakui eksistensi suatu bangsa dan suku-suku yang ada di dalamnya. Perbedaan suku dan bangsa tidaklah menjadi penghalang untuk saling tolong menolong yang didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keTuhanan. Perbedaan agama tidak penghalang untuk bekerjasama, saling membantu dan menolong dalam urusan sosial kemasyarakatan (mu'amalah).



Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang plural/majemuk. Kemajemukan itu meliputi ras, suku, bahasa, adat dan budaya, warna kulit bahkan agama. Dari segi suku bangsa, ada suku Aceh, Batak, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Dayak, Ambon, Bugis, Papua dsb. Dari segi etnis; ada etnis Arab, Hindia, Tionghoa dsb. Masing-masing mempunyai adat dan tradisinya sendiri-sendiri. Dan dari segi agama penduduk Indonesia terdiri dari beragam agama yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buda dan Konghuchu. Keberagaman itu merupakan kekayaan khazanah bangsa yang harus kita rawat dan pelihara dengan sebaik-baiknya di bawah naungan pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur`an.

Toleransi mengharuskan kita untuk menjunjung tinggi rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta menghindari pertentangan. Kita **Bersatu dalam keberagaman**, itulah yang disebut dengan “Bhineka Tunggal Ika”. Walaupun berbeda, kita tetap satu; satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa yaitu Indonesia. Perbedaan **suku** tidak boleh membuat kita saling **berseteru**. Perbedaan **bahasa dan budaya** tidak boleh membuat kita saling **menghina dan mencela**. Dan.... **perbedaan agama/keyakinan** tidak harus membuat kita saling saling **berjauhan** dan **bermusuhan**. Tapi mari saling **menghargai**, saling **menghormati** dan saling **toleransi**.

Sikap ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memimpin negara Madinah yang terdiri dari berbagai etnis dan golongan. Seperti suku ‘Auz dan Khazraj, golongan Anshar (penduduk asli Mainah) dan Muhajirin yang datang dari Mekah. Selain itu juga terdapat keragaman dalam agama; ada umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam. Namun Rasulullah tidak pernah memaksakan Islam kepada orang-orang Yahudi dan

Nasrani dikala itu, karena Al-Qur`an mengajarkan “tidak ada paksaan untuk memasuki agama” (*laa ikraaha fiddiin*).

Untuk membangun persaudaraan, Rasulullah telah berhasil mendamaikan dua suku yang berseteru yaitu ‘Auz dan Khazraj. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran: “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu di masa Jahiliyah bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara...*” (Lihat Tafsir Al-Maraghi, Jld. II, hlm. 11).

Untuk membangun serta memelihara kehidupan yang damai, Rasulullah telah membuat aturan-aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sebagai contoh salah satu pasal Piagam Madinah itu berbunyi: “*Orang-orang Yahudi dari bani ‘Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan orang-orang muslimpun berpegang pada agama mereka, termasuk juga sekutu-sekutu dari mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat aniaya dan durhaka. Orang-orang yang semacam itu hanya akan merusak diri dan keluarga mereka*” (Lihat Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, hlm. 63). ).

Inilah konstitusi yang pertama lahir di dunia dan diakui oleh para ahli hukum Tata Negara moderen. Fakta-fakta historis itu membuktikan kepada kita bahwa urusan toleransi dalam agama Islam bukanlah suatu hal yang baru dan asing tapi merupakan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam makna *Islam rahmatan lil ‘alamin* itu sendiri. Rahmat itu berasal dari Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan kitapun berkewajiban menebarkan kasih sayang kepada semua

mahluk yang ada di bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

ارْحَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Sayangilah makhluk yang ada di bumi niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit”. Yaitu Allah Yang Mahapengasih.

Bukankah Islam itu berasal dari kata *aslama* yang berarti patuh dan tunduk. Kepatuhan dan kertundukan kepada ajaran Islam akan mengantarkan kita kepada keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian (salam). Untuk membangun sikap toleransi itu, Al-Qur`an mengajarkan agar kita melakukan dialog dengan umat lain dalam suasana saling menghormati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-‘Ankabut ayat 46. Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri”.

Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini dalam Tafsirnya *Tafsir Al-Maraghi*, Jld. 7 halaman 192, “apabila datang kepadamu orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani meminta pandangan tentang agama, maka hadapilah dengan kelembutan, kesantunan dan emosi yang terkendali. Kecuali kalau mereka berbuat zalim. Yang dimaksud dengan zalim disini adalah menyimpang dari kebenaran, sikap menantang dengan penuh keangkuhan serta menyatakan permusuhan nya kepadamu Fakta sejarah juga mengungkapkan kepada

kita bahwa kedatangan Islam ke nusantara Indonesia dulunya dengan mudah diterima oleh penduduk negeri ini, meskipun sebelumnya mereka sudah menganut agama tertentu seperti Hindu dan Buda. Hal itu tiada lain karena Islam tampil sebagai pengayom semua manusia dan mengajarkan kedamaian kepada sesama umat manusia. Raja-raja yang dulunya menganut agama Hindu atau Budha secara perlahan-lahan masuk ke dalam Islam, sehingga berdirilah kerajaan Islam Nusantara. Itulah buah manis dari sikap toleransi yang ditunjukkan para da'i, ulama dan para Wali dalam mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri ini. *Wallahu a'lam bisshawab*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Kosasih. 2003. *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Ibnu Katsir. 2002. *Mukhtashar tafsir Ibnu Katsir* Juz. III. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah. Ahmad Musthafa al-Maraghi. 2001. *Tafsir Al-Maraghi*, Jld. II. Beirut: Darul Fikri. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia. 2019. *Diskursus Kerukunan Antarumat Beragama Perspektif Islam*.

# **OPTIMISME KERUKUNAN**



**ADI BERMASA**

#### **A. KERUKUNAN ITU MENSEJAHTERAKAN.**

Kita warga Sumatra Barat pantas bersyukur. Sebab nikmat kerukunan sangat terasa di negeri ini. Meski beragam komunitas suku, ibadah sunat yang beragam, pakaian beragam penampilan, namun sesama warga terkadang berlainan agama dan kepercayaan, tapi tak saling cemburu, iri ataupun dengki. Sangat terasa nikmat kehidupan yang rukun di tanah bertuah, Minangkabau yang dibanggakan bersama sama.

Sama sekali tak jadi pertentangan di antara warga bermukim disini berlainan cara ibadah sunat yang dilakukannya. Bersorban lilit tebal ataupun lelaki tak berpeci tidak ada yang mempersoalkan. Begitu terasa kehidupan rukun di Sumbar ini, meski pelaku kriminal terus beraksi, namun cepat atau lambat pasti digulung polisi. Bahkan mereka yang melakukan kejahatan sulit yang lolos dari tangkapan pihak berwajib.

Sumatera Barat yang kondusif yang sama sama kita rasakan perlu terus kita nikmati. Jangan sampai ada yang mengacaukan tanah bertuah ini. Mari terus kita bina hidup saling rukun dan damai penuh saling pengertian. Kita hindari saling mencurigai, menang sendiri. Bahkan kitapun tak ingin muncul gesekan menimbulkan kebencian sesama se suku, se agama, se bangsa, se tanah air. Kita hormati alim ulama, tokoh agama berbeda kepercayaan dan suku.

Kita berharap kerukunan yang sudah terbina baik di daerah ini jadilah semakin berkembang positif di Indonesia yang kita banggakan. Mari kita taati ajaran

agama yang kita anut. Jangan sesama anak bangsa mau di adu domba. Meski kecenderungan muncul gesekan perpecahan, janganlah diterima mentah- mentah. Hindari sesama kita berkelahi tidak berketentuan. Meski tak bisa dibantah, bahwa gerakan merugikan negeri ini sudah tsrlihat nyata dalam tampilan media, pantasnyakegesitan aparat keamanan cepat bertindak. Yang penting, mari sama dihindari gesekan. Utamakan penyelesaian sistem kerohanian menyejukkan. Bersama kita mampu menyelesaikan beragam gesekan. Syaratnya jangan pakai sistem membelah bambu. Satu dipijak, satu lagi diangkat.

Pemimpin, apapun jabatan dan perannya punya kewajiban moral menyejukkan negeri ini. Yang terbaik pakailah ilmu merangkul. Maksimalkan peran tokoh masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai. Hindari menyudutkan tokoh Islami berpengaruh. Dan peran beragam pemuka agama di Indonesia sangat menentukan kerukunan bangsa yang besar ini. Dan sangat pantas pemimpin pemerintahan di negeri ini terjadwal saling berdialog dengan tokoh bangsa beragam agama di Indonesia. Jangan sampai ada mereka yang dikucilkan.

Dialog, tukar pikiran adengan mengutamakan keutuhan bangsa, Insyaallah negeri ini semakin lebih baik. Semoga saja terjalannya hubungan lebih baik antara pemerintah dengan ulama, cendekiawan tokoh bangsa kesejahteraan akan muncul dengansendirinya. Dan kehidupan rukun penuh saling pengertian sangat dibutuhkan oleh bangsa yang besar ini. Indonesia yang kita banggakan. Insya Allah. (H. Adi Bermasa, dimuat dalam kolom Catatan KORAN PADANG, 4 Desember 2020)

#### **B. PASAMAN AMAN**

Berkunjung ke Pasaman mengasyikkan. Udaranya sejuk. Masyarakatnya ramah. Selalu rukun dalam keseharian. Dalam peribadatan, mereka punya banyak

rumah ibadah, terutama yang beragama Islam. Tiap jorong punya masjid, bahkan mushalla pun rata-rata tiap kawasan perkampungan punya Mushalla, terutama kawasan yang agak jauh dari masjid. Namun dalam peribadatan Jumat, mereka mengutamakan tempatnya di masjid, walau agak jauh dari pemukimannya. Khusus rumah ibadah warga non Muslim, di Pasaman terdapat 2 buah, berlokasi di Panti. Lokasinya berdekatan di pusat kecamatan.

Kehidupan warga Pasaman dengan tiga agama berbeda : Islam, Katolik dan Protestan. Keseharian warga atau pemeluk masing-masing Agama penuh saling pengertian. Jauh dari konflik atau pertentangan yang tak dikehendaki.

Baik warga beragama Katolik ataupun Protestan dipimpin Pendeta Daniel Siagian dan Pastor Ambarita. Kedua mereka terus berusaha membimbing jemaah masing-masing beribadat sesuai dengan tuntunan yang disampaikan melalui gereja tempat peribadatannya.

Rukunnya kehidupan umat beragama di Pasaman boleh jadi saling pengertian antar mereka beda agama sudah terjalin sejak lama. Apalagi mereka yang hidup sudah turun temurun di daerah ini dikabarkan berasal dari satu suku, Tapanuli, terkenal dengan marga Batak.

Mereka, pendatang dulunya dari utara, sementara yang Islami sebenarnya sudah beragam asalnya, nampaknya menjadikan Pasaman dan sekitarnya sebagai tanah rantau mereka. Itu dulunya. Dan sekarang warga berbeda agama di Pasaman boleh jadi sudah penduduk asli, sesuai dengan kartu penduduk yang dimilikinya.

Kakandepag. Pasaman H. Dedi Wandura didampingi Kepala Tata Usahanya Drs. Asrul mengemukakan bahwa



kerukunan antar warga berbeda agama terbilang membanggakan. Antar pemeluk agama berbeda selalu hidup saling pengertian. Beragam kehidupan berkeluarga, berkampung dan bernagari sama sekali tak ada kendali. Yang petani berusaha di sawah dan di ladang. Mereka yang berprofesi bisnis juga sibuk mengembangkan usahanya.

Hanya saja, ada yang cukup menggelitik disampaikan Kakandepag. H. Dedi Wandra, berkaitan dengan kesuburan tanah Pasaman. Apa yang ditanam tumbuh subur dan mendatangkan rezeki. Tersebutlah tanaman enau sangat sesuai dengan tanah Pasaman. Bahkan air buah enau itu ternama dengan "nira" sungguh sangat nikmat untuk melepas dahaga. Air nira itu juga bisa diolah jadi "gula enau". Saka niro.

Di balik manfaat positif air nira itu, juga bisa diolah jadi "tuak". Memabukkan. Dan mabuk mabukan jelas tak dikehendaki ajaran Islam. Inilah problema yang perlu kita pecahkan bersama. Dan minuman memabukkan itu pohonnya tumbuh subur berkepanjangan di Pasaman dan sekitarnya.

Karena "tuak" dari air enau itu tentu tak dikehendaki oleh warga yang beragama Islam, namun beralih usaha dari berbisnis "tuak" pindah jadi pebisnis "gula enau", inilah yang perlu keseriusan bersama. Mungkinkah "tuak" tak lagi di produksi? Beralih usaha jadi pebisnis "gula enau". Sementara kecanduan minuman keras, berupa "tuak" itu sudah berlangsung turun temurun sejak zaman baheula.

"Ini tantangan kita bersama", kata Kakandepag. Pasaman Dedi Wandra serius di hadapan tim FKUB Sumbar berkunjung ke kawasan "Pasaman" yang dipimpin Bupati Yusuf Lubis ini. Tentang peredaran "tuak"

bersumber dari pohon enau yang subur di Pasaman, disebutkan Kakandepag.

Dedi Wandra, bahwa pihaknya berusaha mendirikan bisnis usaha ekonomi produktif (UEP) melalui lembaga yang dibinanya, Koperasi Kandepag. Dan tampaknya Kandepag. Dedi serius. Dan dikatakannya bahwa fasilitas olah raga berhasil dibangun secara mandiri oleh Kandepag. Pasaman. Dimanfaatkan untuk umum dengan aturan tertentu. Masuk juga dana memperkaya kas koperasi. Semoga saja bisnis "gula enau" boleh jadi menggiurkan juga prospeknya, kata Dedi Wandra. "Tuak haram untuk Islam. Gula enau halal".

- C. **SOLOK SELATAN KAWASAN MEMBANGGAKAN**  
Solok Selatan boleh jadi ibarat kabupaten "tanah sorga masa depan. Begitu banyak potensi kesejahteraan di negeri "seribu rumah gadang" ini. Disamping masyarakatnya ramah, tanahnya subur pula. Semua yang ditanam tumbuh subur. Bahkan harta tedpendamnya butuh tangan terampil mengolahnya. Emas, perak dan beragam bahan tambang lainnya butuh tokoh serius jujur untuk mengolahnya.

Dalam dialog sehari Rabu (4/11) tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar dengan beberapa pemuka masyarakat "serantau dan sesurambi" itu muncul beragam pemikiran untuk kesejahteraan warga setempat. Mereka, warga yang arif bijaksana menyampaikan pendapat dari hati ke hati bertujuan untuk kesejahteraan masa depan kawasan kebanggaan ini.

Dialog yang berlangsung di aula Kemenag. Solok Selatan yang sejuk itu memunculkan isi nurani pemuka yang hadir, mencakup:

### **PROBLEMA PERTANAHAN.**

Sangat diharapkan semua pihak, Pemerintah dan masyarakat selalu arif dan bijaksana semua yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Dan tidak diharapkan tanah jadi sumber konflik masa depan. Untuk itu hutan lindung, hutan produksi serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wajib selalu jadi perhatian bersama memelihara dan memanfaatkannya. Apa saja yang berkaitan dengan tanah diperlukan keseriusan untuk pemanfaatannya dengan kesepakatan bersama, demi menghindari konflik tak diinginkan.

### **TANAH ULAYAT**

Dari dialog yang muncul, berkaitan dengan tanah ulayat, yang sebenarnya peran ninik mamak sangat menentukan. Untuk itu keberadaan tanah ulayat mutlak jelas lokasinya. Kalau akan dimanfaatkan atau diolah, diharapkan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibuat. Dan selama ini cenderung pemanfaatan tanah ulayat pihak pemerintah selalu dominan, sehingga anak-kemenakan gigit jari, disebabkan tokoh masyarakat, ninik mamak tak begitu maksimal perannya dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh "pihak lain".

Perlu memfungsikan maksimal peran ninik mamak bersama Kepala Daerah berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat. Bahkan tak diharapkan tanah ulayat yang begitu luas di Solok Selatan, sementara ninik mamak tak begitu asin lidahnya lagi.

### **RUMAH IBADAH.**

Yang membanggakan di Solok Selatan menonjolnya pembangunan rumah ibadah seperti Masjid dan Mushalla. Bahkan tak jarang pembangunan rumah ibadah antara satu dengan yang lain tak begitu berjarak. Boleh jadi pertanda kesejahteraan rakyat makin meningkat. Namun dalam membangun tentu tak

diharapkan muncul persaingan sesama umat berdekatan. Warga tak seberapa, sehingga rumah ibadah minim jemaah, disebabkan arahan pemerintah, seperti Wali Nagari, KUA, Jorong tak begitu berperan layak atau perlunya membangun rumah ibadah saling berdekatan satu sama lain.

#### **KHILAFIYAH**

Yang tak perlu dipersoalkan adalah masalah khilafiyah. Berbeda ibadah sunat. Yang penting, silahkan saja beribadah sesuai dengan sunnah. Dan mengikuti ulama yang dalam pemahaman ajaran Islaminya, pantas jadi panutan ummat. Dan sangat diharapkan KUA berperan maksimal memunculkan kerukunan umat beragama sesuai dengan budaya setempat.

Bagaimanapun Solok Selatan adalah salah satu kabupaten yang menjanjikan masa depan yang baik dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Dan tidak diharapkan terjadinya ayam bertelur diatas padi mati kelaparan.

Hidup damai sejahtera lahir bathin warga Solok Selatan adalah dambaan kita bersama. Hidup selalu rukun dan damai selalu jadi keinginan kita bersama. Semoga " dialog" FKUB Sumbar dengan pemuka warga Solok Selatan bermanfaat bagi warga " Serantau se Surambi" dalam arti yang sebenarnya. Insyaallah! (H. Adi Bermasa, dimuat dalam kolom Catatan KORAN PADANG, 6 November 2020).

#### **D. PERAN PENTING FKUB**

Lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah lama juga keberadaannya di Indonesia. Termasuk di Sumbar, keberadaan FKUB bersamaan dengan mulainya era kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno. Sudah mendekati 10 tahun. Meski untuk kota dan kabupaten masih ada dua daerah yang belum terbentuk

lembaga kerukunan ini, yaitu Tanahdatar dan Pesisir Selatan. Semoga saja Forkompimda dua daerah tersebut terus berusaha untuk memunculkan FKUB tersebut. Tentu peran Kesbang bersama Kandepag. setempat sangat ditunggu banyak pihak kemampuannya menumbuhkan FKUB sebagai mitra pemerintah lebih maksimal lagi memunculkan kehidupan rukun dan damai di tengah masyarakat secara keseluruhan.

Dengan keberadaan FKUB dengan program unggulannya "selalu rukun" meski agama saling berbeda, semoga saja manfaatnya semakin dirasakan masyarakat banyak.

Setiap turun tim FKUB Sumbar ke berbagai daerah, selalu terjalin kerjasama positif antara kelembagaan provinsi dengan pengurus FKUB kota dan kabupaten. Namun disini pulalah munculnya beragam problema yang perlu ditindaklanjuti oleh banyak pihak demi kepentingan masyarakat banyak.

Problema yang sering muncul atau dikeluhkan berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat dan perlunya lebih diperjelas peran pemuka masyarakat berkaitan dengan pembangunan yang akan dilakukan. Sebutlah penggunaan tanah untuk pembangunan tentu tak boleh dilakukan dengan kesewenang wenangan. Kalau memang tanah yang akan dipergunakan untuk lokasi fisik bangunan tentu berupa tanah ulayat tentu ninik mamak pemilik suku dan pusaka wajib dibawa berunding *beriya - bertida*. Dan kesewenang wenangan membabi buta jelas tak masanya lagi. Inilah peran strategis FKUB berusaha maksimal agar banyak pihak mengutamakan kerukunan, apa saja yang diprogramkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Pemerintah sengaja memunculkan lembaga kerukunan ini untuk mengantisipasi munculnya konflik kepentingan yang memunculkan pertentangan di tengah masyarakat.

Cenderung dalam sesi dialog beragam problema terpendam kemasyarakatan muncul ke permukaan. Dan tim FKUB Sumbar selalu berusaha memunculkan rancangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan. Memang bagus. Namun peran peserta pertemuan dari "tuan rumah", unsur Kesbang, Kemepag, cendekiawan setempat, ninik mamak, alim ulama dan perangkat lainnya menindaklanjuti hasil pertemuan itu dengan berbagai pihak, terutama mencari pemecahan yang terbaik.

Kalaulah hanya dalam pertemuan itu semuanya serius, tapi tak ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah, tentu semuanya mubazir belaka.

Bagaimanapun juga, kerukunan selalu dibutuhkan untuk ketentraman bangsa yang besar ini. Jelas peran FKUB dengan kelembagaannya diisi oleh pemuka beragam agama di negeri ini sebenarnya sangat strategis menciptakan hidup damai saling pengertian di negara ini. Sebaliknya peran FKUB tak dimaksimalkan, jelas yang muncul hanya kerukunan semu yang tak begitu berarti. (H. Adi Bermasa, dimuat dalam kolom Catatan KORAN PADANG, 27 November 2020)

## **MEMAHAMI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MITIGASI INTOLERAN**

**oleh: Bakhtiar**



Intoleran menjadi isu penting dewasa ini. Soalnya, di hampir seluruh daerah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat merugikan dan mengorbankan baik yang dilakukan secara individu maupun komunal. Bukan hanya dilakukan masyarakat biasa melainkan juga para elit bahkan tidak jarang pemicunya berawal dari pernyataan dan sikap para pemangku kepentingan di negeri ini. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dengan akibat yang lebih memiriskan dan kadang menyakitkan akibat terjadinya intoleransi. Hal itu, bukan hanya terkait dengan perbedaan keyakinan keagamaan melainkan juga disebabkan kepentingan ekonomi, jabatan dan sebagainya.

Masyarakat, umumnya menghendaki kedamaian dan kenyamanan sehingga lebih dapat membangun sesuai dengan rencana. Dalam kaitannya dengan itu, beberapa kekuatiran dan potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat pada beberapa daerah tidak lepas dari keabaian terhadap kearifan lokal. Di Dharmasraya potensi konflik terjadi akibat prilaku dan sikap sebagian masyarakat yang tidak mempertimbangkan keadaan sosiologis masyarakat setempat. Hal itu, terungkap dari Monev yang dilakukan selama dua hari, yaitu tanggal 24-25 Desember 2020.

*Pertama*, Dharmasraya. Pertemuan pertama berlangsung dengan Hamid Arwani, Kepala TU Kemenag kab. Dharmasraya. Pada pertemuan ini terungkap pelaksanaan ibadah terdapat tiga lokasi di Sungai Rumbai, satu di Koto Besar, satu di Sitiung dan satu di Sikabau. Sementara di Kampung Baru terdapat tiga rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Rumah ini di sewa oleh jemaatnya dengan aliran pantai kosta

dan HKPB (Huria Kristen Batak Protestan). Sementara di Sungai Rumbai adalah Katolik. Selama ini belum ada menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pelaksanaan ibadah natal hanya dilaksanakan di Sungai Rumbai. Sementara di tempat lain tidak dilaksanakan karena alasan Covid-19, banyak yang pulang kampung dan menghilangkan trauma tahun yang lalu.

Masyarakat lokal pada prinsipnya dapat menerima umat lain melaksanakan ibadah selama tidak membawa simbol dan merek agama. Hanya saja potensi konflik muncul akibat adanya penampungan babi hasil buruan "anak dalam" di Sialang, kec. P. Punjung. Apalagi babi tersebut dibawa seperti membawa kambing tanpa mempertimbangkan psikologis masyarakat sekitar. Lebih dari itu, ada temuan dari dinas kesehatan kab. Dharmasraya terdapat di antara bakso yang dijual beberapa orang terkontaminasi babi. Selain itu, rasa terback-upnya oleh pejabat kepolisian yang beragama sama dengan yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, dalam pengamatan Romo, sekretaris PC NU kab Dharmasraya selama perjalanannya ke kantor Kemenag Kab. Dharmasraya tidak ada tanda-tanda akan dilaksanakan natalan, kecuali hanya di Sungai Rumbai termasuk di Sikabau. Situasi dalam pantauannya aman dan kondusif. NU sendiri dalam hal ini juga menurunkan banser pada titik-titik perayaan natal. Hal yang senada juga dijelaskan Mawardi, anggota FKUB Dharmasraya dalam Monev tersebut. Menurutnya, selama perjalanannya di perjalanan sampai ke Kemenag tidak ada tanda-tanda akan terjadinya ekses pada natalan sekarang meskipun polisi terlihat melakukan patroli.

Hal lain yang terungkap dalam Monev ini terkait dengan stempel gereja meskipun dalam faktanya gereja itu sendiri tidak



ada pada tempat tersebut. Menurut Mawardi, yang juga pernah menerima surat yang berstempel demikian ketika masih aktif mengajar untuk kepentingan nilai pendidikan agama bagi anak-anak non muslim, stempel tersebut dibubuhkan pada surat dari tokoh atau perkumpulan non muslim. Selain itu, stempel ini juga digunakan untuk kepentingan administrasi pernikahan jemaatnya. Apabila penggunaan stempel ini tidak direspon secara tidak langsung memberikan pengakuan terhadap adanya gereja pada lokasinya tersebut. Pernyataan ini juga diperkuat Abdel Haq, kepala Kemenag Dharmasraya bahwa Kemenag nanti akan berkoordinasi mencari beberapa alternatif terkait dengan hal ini.

Selanjutnya, persoalan yang terungkap terkait dengan tempat pemakaman non muslim. Dalam hal itu, sepakat untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi tempat pemakaman tersebut dengan cara memberikan satu lokasi khusus untuk non muslim. Sebab, jemaat non muslim tidak akan mungkin dikuburkan dipemakaman muslim termasuk juga dimakamkan di lingkungan perumahan. Hal ini akan dapat menyebabkan terjadinya ekse yang akan menimbulkan konflik karena budaya dan keyakinan yang berbeda. Apalagi terdapat prosesi yang tidak sejalan dengan adat kebiasaan mayoritas masyarakat sekitar, seperti pemindahan dan penyimpanan tulang belulang orang yang sudah meninggal dunia.

Situasi jelang dan pelaksanaan natalan di Dharmasraya berada dalam keadaan aman, kondusif dan tidak terdapat gejolak. Meskipun demikian, pihak kepolisian tetap menurunkan anggota polisi untuk melakukan pemantauan dan patroli dalam rangka berjaga-jaga. Hal itu, disebabkan adanya kekuatiran akan kembali terjadinya peristiwa seperti tahun 2019

lalu. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah melakukan rapat koordinasi dengan satuan organisasi pemerintah, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat termasuk dengan tokoh agama yang beragama non muslim (Protestan dan Katolik). Dalam rapat tersebut tokoh non muslim sebagaimana yang diinformasikan Hamid arwani, hanya akan melaksanakan natalan di Sungai Rumbai. Tempat ini merupakan gedung yang disewa oleh jemaat untuk melaksanakan ibadah setiap minggu. Sementara di tempat lain seperti Kampung Baru. Sikabau serta Talabang tidak ada prosesi natalan karena adanya protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya kerumunan dan jemaat banyak yang pulang kampung. Selain itu, jemaat juga menghilangkan trauma dengan kejadian tahun lalu.

*Kedua, Sijunjung.* Pertemuan dengan beberapa tokoh dan elemen masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020. *Pertama,* pertemuan dengan Ruhil Qudus, Ketua FKUB Kab. Sijunjung. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11.15-12.30 Wib. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa keresahan masyarakat terjadi akibat adanya perilaku sikap yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal berupa jual beli Babi. Kemudian, daging Babi yang sudah membusuk dibuang di sekitar sungai Tanah Badantuang. Selain itu, terungkap pula bahwa Gonzales, penyuluh agama Katolik, dalam menjalankan tugasnya tidak ada koordinasi dengan kementerian agama termasuk juga dengan tokoh masyarakat, seperti KUA, wali nagari dan ninik mamak. Berbeda dengan penyuluh agama Budha yang berkoordinasi dengan kementerian agama. Dalam hal itu, kementerian agama memfasilitasinya dalam menjalankan tugas-tugas kepenyuluhannya. Sementara itu, FKUB dalam menjalankan tugas-tugasnya berjalan dengan baik dan lancar serta aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen.

*Kedua*, pertemuan dengan Ramadhi Kurniawan (Kapolsek Kamang Baru), David Rinaldo (Kakan Kesbangpol Kab. Sijunjung), Jasril (Camat Kamang Baru) dan Syahbudin Dt. Sinaro Abu (Wali Nagari Kunangan Parit Rantang). Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.30-18.30 di Wahana Talabang Sakti Nagari Kamang Kec. Kamang Baru dalam bentuk mapping dengan pejabat dan tokoh masyarakat. Hadir antara lain Ramadhi Kurniawan (Kapolsek Kamang Baru), David Rinaldo (Kakan Kesbangpol Kab. Sijunjung), Jasril (Camat Kamang Baru) dan Syahbudin Dt. Sinaro Abu (Wali Nagari Kunangan Parit Rantang).

*Mapping* pada tempat ini secara khusus terkait dengan tindaklanjut dari pertemuan FKUB Sumatera Barat dengan tokoh masyarakat sebelumnya, tanggal 3 November terkait dengan potensi konflik yang terdapat pada daerah ini. Sehubungan dengan situasi menjelang natal dan tahun baru Kapolsek menyatakan bahwa daerah ini dalam keadaan aman dan kondusif. Meskipun demikian, polisi tetap menyiagakan dan melakukan patroli terutama pada lokasi yang sebelumnya dilaksanakan prosesi natalan. Dalam upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menghadapi natal dan tahun baru pihak kepolisian telah menginisiasi pertemuan tokoh dan seluruh elemen masyarakat termasuk dengan tokoh protestan dan katolik sendiri khususnya di kec. Kamang Baru.

Sejalan dengan itu, Dt. Abu mempertegas kembali komitmen tokoh dan masyarakat untuk menjamin adanya kedamaian dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam hal itu, sangat penting untuk kembali mengikuti perjanjian yang sudah ditandatangani antara ninik mamak dan jemaah HKBP untuk taat dan patuh pada peraturan yang ditetapkan nagari beserta ninik mamak. Selama ini keadaannya kondusif dan aman, dan tidak pernah

terjadi permasalahan. Persoalan muncul sejak adanya jemaah Katolik masuk ke Kamang Baru. Dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan tidak meminta izin atau memberi tahu pemerintah nagari dan ninik mamak dalam berbagai kegiatan yang mereka selenggarakan termasuk menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Kemudian langkah yang dilakukan Kapolres Sijunjung memfasilitasi pertemuan lintas sektoral merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam memelihara dan menciptakan situasi dan kerukunan yang sudah berjalan dengan baik.

Dalam pantauan tokoh masyarakat Dharmasraya, seperti Dt. Abu, yang juga wali nagari Sungai Tambang, pada tempat-tempat yang pada tahun lalu melaksanakan natalan bersama tidak ada lagi tanda-tanda dilaksanakannya perayaan natal. Tempat dimaksud, di antaranya terdapat di Sungai Rumbai pada tiga lokasi, di Koto Besar satu lokasi dan di Sikabau satu lokasi. Pada tempat ini biasanya digunakan rumah sebagai tempat ibadah oleh jemaah pantai kosta dan AKBP. Khusus di Sungai Rumbai berlokasi di Blok D jemaah Katolik melaksanakan prosesi natalan. Sehubungan dengan potensi terjadinya konflik Datuk Abu mengungkapkan bahwa:

"Yang terpenting nagari kami aman dan damai. Kami tidak melarang mereka melakukan ibadah di rumahnya, tetapi masyarakat tidak menerima jika hal itu menggunakan simbol-simbol agamanya. Kemudian, kegiatannya tidak dilaksanakan secara demonstratif dan mendatangkan jemaah yang berasal dari tempat lain. Jadi, kalau di rumahnya beribadah tidak ada kami melakukan pelarangan."

Jadi, tidak ada pelarangan beribadah oleh masyarakat setempat selama tidak memakai merek dan simbol-simbol

agama secara mencolok. Sejalan dengan pernyataan di atas, Datuk Abu menjelaskan bahwa terjadinya masalah kerukunan mulai sejak masuknya orang-orang yang beragama Katolik. Pada hal sebelumnya tidak ada masalah. Apalagi sebelum ini ada perjanjian dengan para ninik mamak dan tokoh masyarakat bahwa mereka yang datang ke nagari tersebut akan patuh terhadap tata aturan dan adat yang berlaku di masyarakat. Terjadinya masalah ini lebih disebabkan karena prilaku dan sikap non muslim yang tidak mau memahami sosiologis dan psikologis masyarakat setempat sebagaimana diungkapkan Datuk Abu bahwa:

"Terjadinya masalah di nagari ini bukan karena kami melarang mereka beribadah, tetapi disebabkan kekurangajarannya. Mereka membawa babi hasil buruan dibawa seperti orang membawa kambing saja. Pada hal masyarakat tidak menyukai perbuatan semacam itu. Begitu pula, mereka membuang daging babi pada sungai sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Pada keadaan demikian itu, kami megambil sikap tegas yang mungkin akan berujung jika tidak mereka yang pindah kami yang pergi."

Persoalan di atas semakin diperkeruh dengan adanya penampungan babi hasil buruan yang dilakukan etnis anak dalam di Sialang, Koto Salak Kecamatan Pulau Punjung. Tambah lagi dengan adanya temuan Dinas Kesehatan Dharmasraya tentang adanya bakso yang terkontaminasi oleh babi. Di samping itu, potensi konflik juga disebabkan adanya warga non Muslim yang merasa terbac-up oleh pejabat kepolisian di daerah karena Kapolres menganut agama yang sama dengan masyarakat non-muslim tersebut. Apalagi dalam peribadatan dan perayaan pejabat dimaksud hadir dalam acara tersebut. Selain itu, juga mereka merasa terbac-up dengan

adanya pengawalan pihak kepolisian meskipun yang ditempatkan dilokasi tersebut hanya dengan memarkiran mobil polisi. Sejalan dengan hal di atas, potensi konflik terjadi akibat adanya rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah tanpa izin dari pihak pemerintahan nagari. Begitu pula penyuluh agama tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sejalan dengan hal di atas, masyarakat tidak melarang melaksanakan ibadah selama dilakukan di rumah masing-masing sebagaimana diungkapkan Datuk Abu bahwa: "kalau ibadah silakan dilakukan di rumah, tetapi tidak diiringi dengan adanya papan nama atau merk yang menunjukkan identitas agama tertentu. Sekarang, larangan itu hanya terkait dengan Covid-19. Sementara itu, Kesbangpol Kab. Sijunjung menambahkan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah ini lebih disebabkan adanya dalam memahami antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Rumah ibadah semestinya ada izin sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan tempat ibadah adalah rumah seseorang yang dijadikan sebagai sarana untuk ibadah. Tempat ibadah ini tidak termasuk yang diatur dalam pendiriannya sebagaimana halnya lokasi atau tempat pelayanan (stasi) umat Kristiani. Namun, sebaiknya tetap memberitahu dan meminta izin kepada pemerintahan nagari setempat termasuk dengan ninik mamak agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kedamaian dan keamanan masyarakat.

Dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru pemerintah daerah ditingkat kecamatan telah melakukan mapping bersama tokoh masyarakat tanggal 22 Desember 2020. Dalam pertemuan tersebut Indra Gunawan, tokoh Katolik di Kamang Baru menjelaskan bahwa perayaan natal 2020 dipusatkan Blok C Jorong Sei Tambang II Nagari Kunpar Kec.

Kamang Baru. Tempat ini merupakan rumah milik Sumarno. Jemaah Katolik di sekitar nagari ini ada sekitar 20 KK. Sementara Pastornya adalah Frely Pasaribu yang di datangkan dari kota Sawahlunto. Sementara jemaah kristen HKBP akan melaksanakan natal di Simpang Batu Baro Jorong Sei Tambang Nagari Kunpar Kec Kamang Baru. Dalam rapat koordinasi tersebut Indra Togar Penetua, tokoh Kristen HKBP menjelaskan bahwa perayaan natal dipusatkan di di gedung/Hall milik Anggiat Siahaan. Dalam upaya menjaga situasi yang kondusif dan menghindari timbulnya gesekan dan konflik pihak pelaksana akan menjaga kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat. Begitu pula dalam menghindari timbulnya cluster baru Covid-19 pelaksanaan natal jemaah dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam dan luar gedung. Sebab, jemaahnya kristen HKBP yang ada di sekitar kecamatan ini ada 150 orang. Selain itu, mapping ini juga menyarankan agar informasi yang di share di media sosial dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan dan menambah persoalan. Apalagi yang di share tersebut terkait dengan hal-hal yang sensitif dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman sehingga tidak memicu dan menimbulkan konflik.

Berkaitan dengan natal di kabupaten Sijunjung dilangsungkan di rumah Sumarno Blok C Jorong Sungai Tambang III Nagari Kunangan Parit Rantang Kec. Kamang Baru sebagaimana yang dilaporkan Indra Togar Penetua ketika rapat koordinasi sebelumnya. Malam natalan ini dilaksanakan hingga pukul 20.30 WIB dengan tema " Menjadi baru bersama kristus dan menjadi pewarta bahagia bagi semua orang" dengan pastornya Yohanes. Malam menyambut kelahiran Yesus tersebut diikuti oleh jemaat Katolik lebih kurang 50 orang yang berasal dari kecamatan Kamang Baru.

Sementara ibadah natal dilaksanakan pada Jum'at, 25 Desember 2020. *Pertama*, jemaat kristen HKBP. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 10.00-11.10 Wib yang dilaksanakan di gedung/hall milik Anggiat Siahaan di Jorong Sei Tambang I Nagari Kunpar Kec.Kamang Baru. Jemaatnya lebih kurang 152 orang, yang dipimpin oleh Togar Siahaan. Kegiatan ini berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa ada gangguan. *Kedua*, jemaat Katolik. Pelaksanaan natal di langsung di rumah Sumarno di Blok C Jorong Sei Tambang III Nagari Kunpar Kec Kamang Baru mulai pukul 10.00-11.15, yang diikuti sekitar 60 orang. Sedangkan pemberi khutbahnya adalah Parater Feri Bancin S.Fil. Selama kegiatan ini berjalan dengan aman dan damai tanpa ada gangguan, sedangkan pengamanannya dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Kamang Baru. *Ketiga*, jemaat Kristen Pantekosta. Kegiatan natal bagi jemaat ini dilaksanakan di rumah Joni Halawa di Jalur I Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang Kec.Kamang Baru mulai pukul 10.00-11.30 Wib dengan pemberi khutbah Bilmar Simanjuntak, yang diikuti sekitar 50 orang. Selama berlangsungnya natalan tidak ada gangguan dan berjalan lancar di bawah pengamanan Polsek Kamang Baru.

*Ketiga*, Sawahlunto. Kota Sawahlunto merupakan pusat pelayanan bagi jemaat Katolik dengan Paroki Santa Barbara dengan membawahi wilayah Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Dharmasraya termasuk Stasi Santa Anastasia di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, kecamatan Pulau Punjung dan Stasi Santo Paulus di Jorong Sungai Tambang, nagari Kunangan Parit Rantang, kec. Kamang Baru. Di Sawahlunto sendiri natal berjalan dengan aman tanpa ada gangguan dibawah pengamanan pihak kepolisian dengan tidak terbuka meskipun jemaat yang datang tidak seramai tahun-



tahun sebelumnya. Begitu pula jumlahnya di Sawahlunto semakin turun.

Pada pertemuan yang dihadiri Oktoversimen, Plt. Kemenag dan kesbangpol kota Sawahlunto terungkap bahwa jemaat yang melaksanakan natalah jauh berkurang, hanya sekitar 40% dari biasanya, dan di antaranya ada yang dari Padang Sibusuk. Selain itu, juga terungkap bahwa pendataan penganut agama yang dilakukan Kemenag dan Kesbangpol tidak begitu rinci.

**PERNYATAAN SIKAP DAN REKOMENDASI  
PADA RAPAT KORDINASI DAN DIALOG KERUKUNAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
PROVINSI, KABUPATEN KOTA 15-16 DESEMBER 2020 DI  
COTTAGE HOTEL AIR ANGGEK SUMATERA BARAT**

Setelah mendengarkan paparan narasumber yang terdiri dari:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di wakili oleh Kepala Kasbangpol tentang *Upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga Kerukunan di Sumatera Barat.*

2. Kapolda Provinsi Sumatera Barat di wakili Direktur Bimas Polda tentang *Menjaga Kondusifitas Kerukunan di Sumatera Barat Menyambut Natal dan Tahun Baru 2021*.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di wakili Kepala Bahagian Tatausaha/ Penganggung Jawab tentang *Kerukunan dan Pendirian Rumah Ibadah di Sumatera Barat*.
4. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat tentang *Kerukunan dan Solusi Konflik*.

Kemudian mendiskusikan secara mendalam dengan peserta berkenaan dengan kerukunan di Sumatera Barat, dialog tentang pendirian Rumah ibadah dan kesiapan menjaga kerukunan dan keamanan menyambut Natal dan Tahun Baru 2021, maka dengan ini disampaikan pernyataan bersama dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **A. PERNYATAAN SIKAP**

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat bersama FKUB Kabupaten Kota se Sumatera Barat menyatakan sikap untuk mengajak semua lapisan umat beraagama untuk sungguh-sungguh menjaga kerukunan, kenyamanan dan ketertiban dalam menyambut Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.
2. FKUB Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat akan terus menguatkan komitmen bersama untuk mengembangkan sikap dialogis, mediasi dan solutif dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan kerukunan, keamanan dan kenyamanan antar umat beragama dan interen umat beragama.
3. FKUB Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat berkomitmen menegakkan disiplin, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pencegahan Pandemi Covid 19 dan memberikan dukungan pada aparat keamanan dan penegak hukum untuk tegas dalam menegakkan hukum secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

## **B. REKOMENDASI**

1. Disadari bahwa pemahaman dan kesamaan pandangan tentang kerukunan dan toleransi sesuai regulasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 masih belum maksimal, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota diminta mengalokasikan anggaran yang secukupnya untuk sosialisasinya dan implementasinya di dengan lingkungan FKUB, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Nagari.
2. Berkenaan dengan belum satunya data rumah ibadah dan yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Sumatera Barat, maka Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat diminta dapat melakukan verifikasi, sinkronisasi dan validasi data, untuk dapat dijadikan acuan Pemeliharaan Kerukunan oleh masyarakat yang diwakili FKUB dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
4. Dalam hal pendirian Rumah Ibadah, FKUB Kabupaten Kota se Sumatera Barat yang diberikan kewenangan oleh PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam memberikan rekomendasi, maka Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan perhatian, fasilitasi dan dukungan yang diperlukan untuk suksesnya tugas tersebut.
5. Dalam menjaga dan memantapkan kerukunan dan ketenteraman serta mencegah timbulnya salah pengertian, gesekan sosial dan perbedaan yang berakibat konflik yang ada kaitannya dengan agama, semua pihak agar mempedomani PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, serta akan lebih mengedepankan kearifan lokal, adat istiadat, kesepakatan sosial yang sudah terbangun sejak lama.

Demikian pernyataan dan rekomendasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak yang terkait.

**Air Anggek, 16 Desember 2020**

**Pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat**

**Ketua,**

**Sekretaris**

**ttd**

**ttd**

**Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag    Drs.H.Nurman Agus**

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Wakil Gubernur selaku Penasehat FKUB Provinsi Sumatera Barat
3. Bupati dan Waliko se Sumatera Barat
4. Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Pansehat FKUB Kabupaten Kota.
5. Kapolda Provnsi Sumatera Barat
6. Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat
7. Kemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
8. Kapolres Kabupaten Kota se Sumatera Barat.
9. Arsip.



